

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA PENERAPAN QUICK RESPONSE CODE INDONESIA
STANDARD (QRIS) DI ACEH
(Studi Kasus UMKM di Kota Banda Aceh)**



Disusun Oleh:

**RENAIL ROZY
NIM. 170603175**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Renail Rozy
NIM : 170603175
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Menyerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Desember 2023
Yang Menyatakan

Renail Rozy

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Problematika Penerapan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* Di Aceh
(Studi Kasus UMKM di Kota Banda Aceh)**

Disusun Oleh:

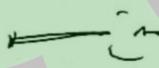
Renail Rozy

NIM: 170603175

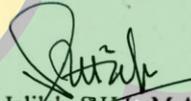
Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan Formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada

Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,


Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc. Ph.D
NIP. 197209072000031001

Pembimbing II,


Jaliyah, S.H.I., M.Ag.
NIDN. 2008068803

Mengetahui,
A R - R Ketua Prodi, Y


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Renail Rozy
NIM : 170603175
Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
E-mail : 170603175@student.ar-raniry.ac.id

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKKU Skripsi SKRIPSI

yang berjudul: **PROBLEMATIKA PENERAPAN QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD (QRIS) DI ACEH (STUDI KASUS UMKM DI KOTA BANDA ACEH)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 27 Desember 2023

Penulis : Pembimbing I Mengetahui
A R - R A N I R Y Pembimbing II

Renail Rozy Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc., Ph.D
NIP.197209072000031001

Jalilah. S.HI., M., Ag
NIP. 198806082023212040

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala kebaikannya laporan Tugas Akhir dalam bentuk skripsi yang berjudul **Problematika Penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Aceh (Studi Kasus UMKM di Kota Banda Aceh)** dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun dengan melewati beberapa tahapan yang melibatkan berbagai pihak sebagai pendukung. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam proses penyusunan laporan ini:

1. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku ketua prodi Perbankan Syariah, Ayumiati, S.E., M.Si selaku sekretaris prodi.
3. Muhammad Arifin., M.Ag., Ph.D selaku ketua laboratorium, serta staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc. Ph.D selaku pembimbing I dan dosen wali atau Penasehat Akademik yang telah membimbing saya dalam perkuliahan dan juga membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Jalilah, S.H.I., M.Ag selaku pembimbing II yang telah membimbing saya dan juga berperan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar dan pegawai di lingkungan Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
7. Kepada pihak Bank Indonesia Provinsi Aceh, dinas koperasi & UKM Aceh, dan para pelaku UMKM-UMKM di kota banda aceh yang telah banyak meluangkan waktu dan tulus membantu penulis dalam memperoleh data dan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian di lapangan dengan wawancara.
8. Kepada keluarga yang mendukung dalam segala hal, terutama kepada orang tua saya Bapak Abdurrahman dan Ibu Suryana serta saudara & saudari saya yang telah membesarkan dan memberikan kasih sayang, semangat dan dukungan doa yang tak henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini,
9. Terimakasih teman-teman jurusan Perbankan Syariah seangkatan beserta sahabat-sahabat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi serta terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak mungkin

disebutkan satu persatu. Semoga doa beserta segala bantuan yang diberikan menjadi amalan baik dan mendapat balasan yang setimpal bahkan lebih.

10. Semua pihak yang telah membantu secara moril dan materil yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Penulis ingin berterimakasih kepada diri sendiri untuk tidak pernah menyerah, untuk terus berjuang menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menyelesaikan semua pekerjaan keras selama ini

Sangat besar harapan penulis agar semua dukungan moral serta materil dapat dibalas kebaikannya oleh Allah Swt dengan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda. Penulis sangat berharap terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini agar nantinya dapat berguna dan memberikan banyak manfaat terutama kepada penulis, pembaca dan pihak-pihak lainnya yang membutuhkan serta menjadi hal positif bagi banyak orang.

Pada akhir kata pengantar ini, penulis memiliki keinginan yang besar agar penelitian pada skripsi ini tidak hanya dilakukan sebagai syarat kelulusan agar memperoleh gelar Sarjana Ekonomi semata, namun juga memberikan edukasi dan pemahaman yang tidak didapatkan dari bahan bacaan lainnya dan memberikan dampak positif yang berguna untuk membangun perkembangan ilmu pengetahuan. Aamiin Ya Rabbal 'Aalamiin.

Banda Aceh, 18 Desember 2023

Penulis,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Renail Rozy

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*
هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا ي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

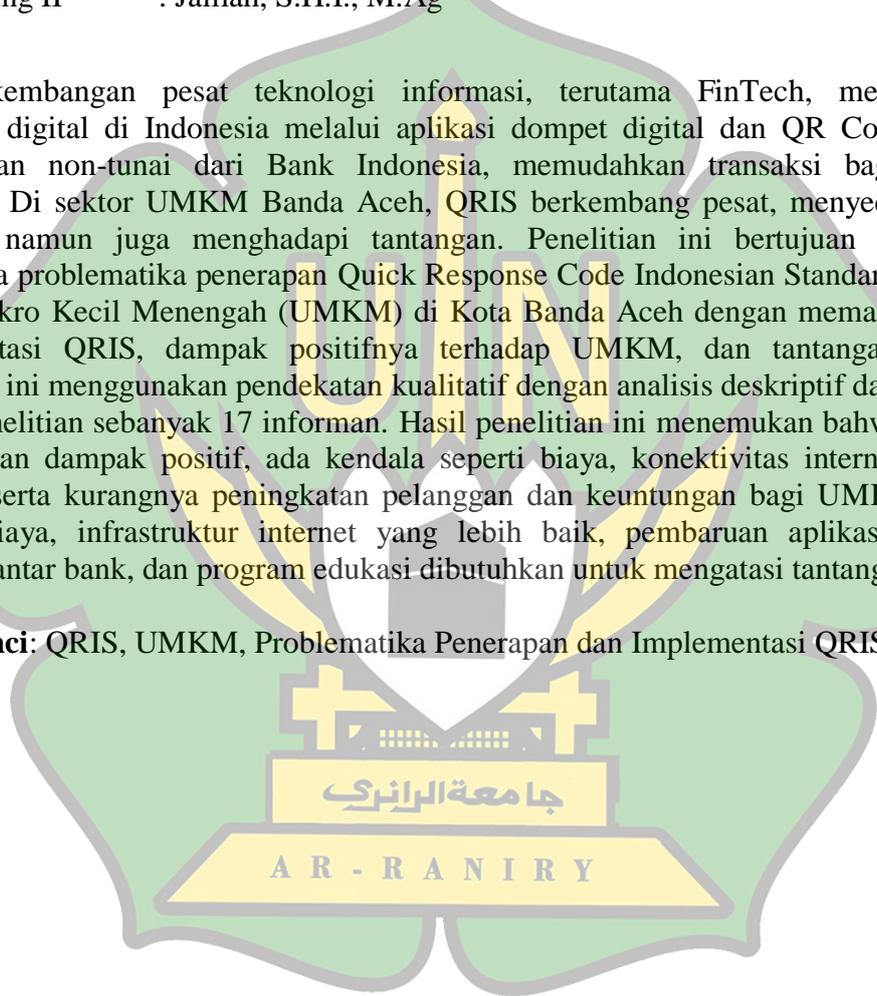
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak diliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Renail Rozy
NIM : 170603175
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Problematika Penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Aceh (Studi Kasus UMKM di Kota Banda Aceh)
Tebal Skripsi : 102 Halaman
Pembimbing I : Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc. Ph.D
Pembimbing II : Jalilah, S.H.I., M.Ag

Perkembangan pesat teknologi informasi, terutama FinTech, memimpin dominasi keuangan digital di Indonesia melalui aplikasi dompet digital dan QR Code. QRIS, standar pembayaran non-tunai dari Bank Indonesia, memudahkan transaksi bagi konsumen dan merchant. Di sektor UMKM Banda Aceh, QRIS berkembang pesat, menyediakan kemudahan transaksi namun juga menghadapi tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana problematika penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh dengan memaparkan mekanisme implementasi QRIS, dampak positifnya terhadap UMKM, dan tantangan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif dan jumlah informan dalam penelitian sebanyak 17 informan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa meskipun QRIS memberikan dampak positif, ada kendala seperti biaya, konektivitas internet, masalah teknis aplikasi, serta kurangnya peningkatan pelanggan dan keuntungan bagi UMKM. Solusi seperti subsidi biaya, infrastruktur internet yang lebih baik, pembaruan aplikasi, efisiensi waktu transaksi antar bank, dan program edukasi dibutuhkan untuk mengatasi tantangan tersebut.

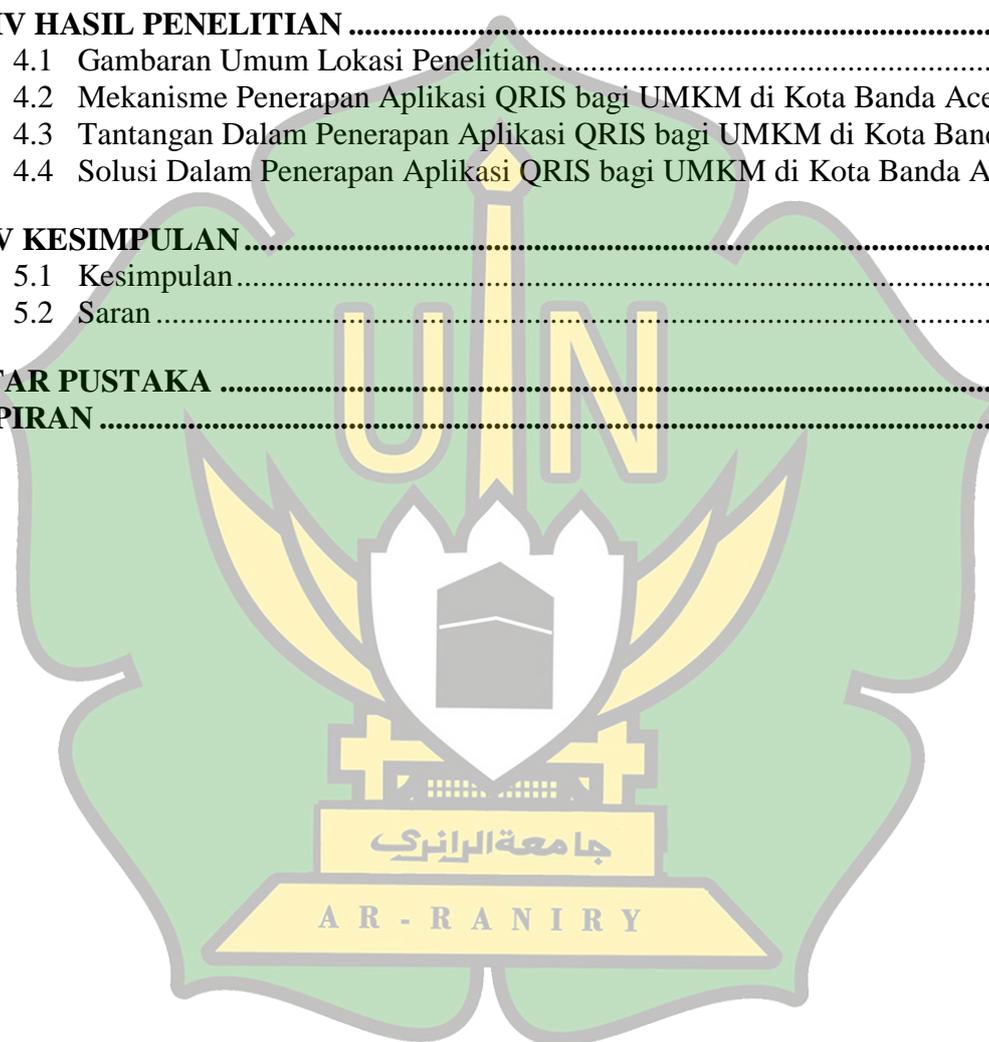
Kata Kunci: QRIS, UMKM, Problematika Penerapan dan Implementasi QRIS.



DAFTAR ISI

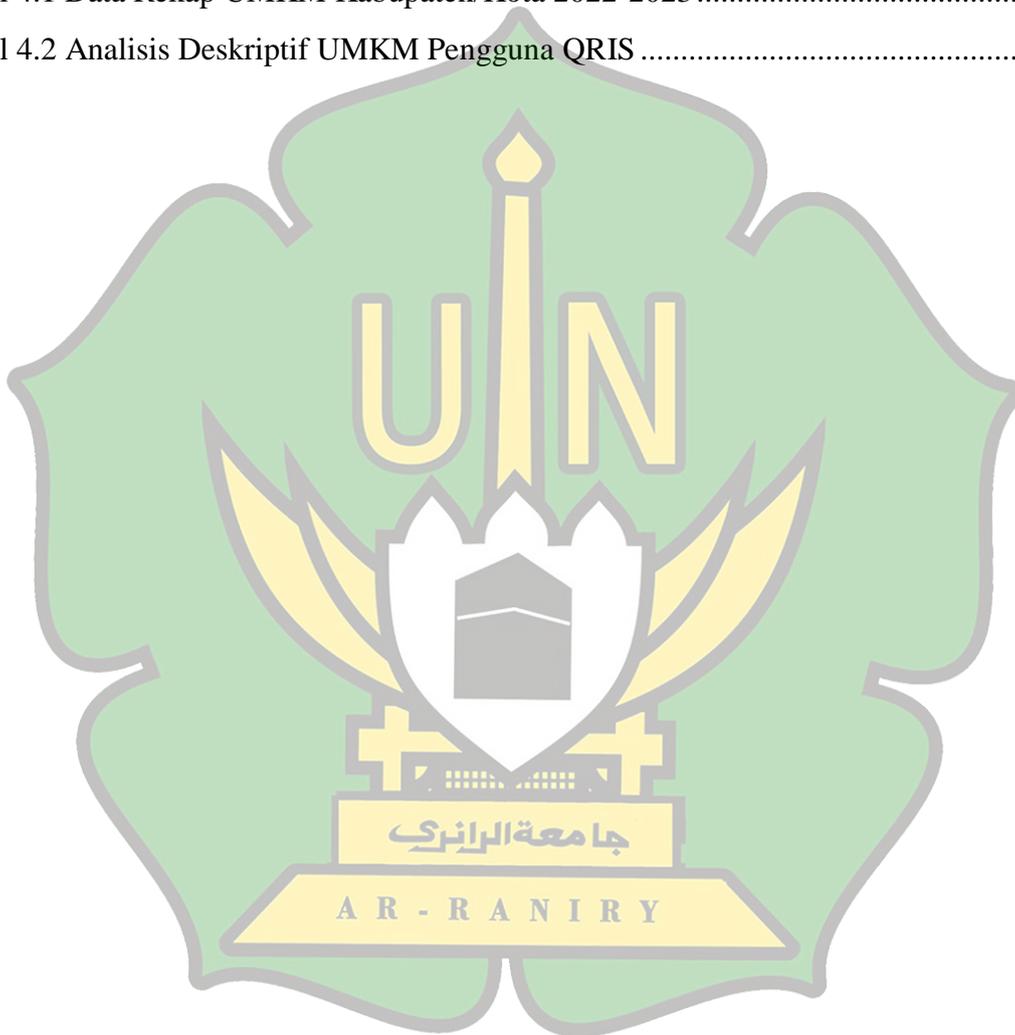
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
KATA PENGANTAR	iii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 <i>Financial Technology</i> (FinTech).....	8
2.1.1 Pengertian FinTech.....	8
2.1.2 Jenis-Jenis FinTech.....	8
2.1.3 Tujuan dan Manfaat FinTech	12
2.1.4 Regulasi dalam <i>Financial Technology</i> (FinTech)	13
2.1.5 Peran FinTech dalam pembayaran	13
2.2 QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).....	13
2.2.1 Sejarah <i>QR (Quick Response) Code</i>	13
2.2.2 Definisi QRIS	14
2.2.3 Landasan Hukum QRIS.....	15
2.2.4 Standarisasi QRIS.....	16
2.2.5 Manfaat QRIS.....	17
2.2.6 Jenis-jenis Pembayaran QRIS.....	17
2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	18
2.3.1 Pengertian UMKM.....	18
2.3.2 Kriteria UMKM.....	19
2.3.3 Karakteristik UMKM	20
2.3.4 Klasifikasi UMKM.....	21
2.3.5 Kelebihan dan Kelemahan UMKM.....	21
2.4 Penelitian Terdahulu.....	22
2.5 Kerangka Berpikir	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
3.1 Desain Penelitian	30
3.2 Objek dan Subyek penelitian.....	31
3.2.1 Objek Penelitian	31
3.2.2 Subyek Penelitian	31
3.3 Sumber data	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data	34
3.4.1 Wawancara	34
3.4.2 Observasi	38

3.4.3 Dokumentasi.....	39
3.5 Metode Analisis Data	39
3.5.1 Reduksi Data.....	39
3.5.2 Penyajian Data.....	39
3.5.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.....	40
3.6 Teknik Keabsahan Data.....	40
3.6.1 Triangulasi sumber	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	41
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
4.2 Mekanisme Penerapan Aplikasi QRIS bagi UMKM di Kota Banda Aceh	45
4.3 Tantangan Dalam Penerapan Aplikasi QRIS bagi UMKM di Kota Banda Aceh	49
4.4 Solusi Dalam Penerapan Aplikasi QRIS bagi UMKM di Kota Banda Aceh	53
BAB V KESIMPULAN	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	65



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3.1 Subyek Penelitian	32
Tabel 3.2 Informan Wawancara	35
Tabel 4.1 Data Rekap UMKM Kabupaten/Kota 2022-2023	42
Tabel 4.2 Analisis Deskriptif UMKM Pengguna QRIS	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Pengguna QRIS Oleh Pedagang/Merchant Tahun 2020-2021 Di Indonesia.....	2
Gambar 1.2 Jumlah Pengguna QRIS Tahun 2022 di kota Banda Aceh	5
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	28



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, bidang industri teknologi informasi mengalami peningkatan secara pesat. Hal ini disebabkan karena banyaknya sarana dan prasana yang menggunakan teknologi bagi masyarakat dalam hal memanfaatkan sumber daya menjadi lebih mudah. Salah satu implementasi teknologi di era digital ini ialah kegiatan transaksi keuangan secara digital atau dikenal dengan *Financial Technology* atau FinTech (Azzahroo & Estiningrum, 2021) . Dalam peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 disebutkan FinTech merupakan suatu penggunaan teknologi sistem keuangan yang menciptakan produk layanan, model, atau teknologi bisnis baru dan dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, kelancaran, efisiensi, keamanan, serta keandalan sistem pembayaran. Percepatan perkembangan ekonomi dan inklusi keuangan digital di suatu negara diyakini akan semakin mudah dengan pengimplementasian FinTech (Harahap, 2021).

Seiring dengan meningkatnya FinTech, saat ini akses pembayaran dalam bentuk digital non-tunai juga berkembang di Indonesia. Terdapat aplikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat yaitu dompet digital (*E-wallet*), yang memungkinkan pengguna dapat menyimpan sejumlah dana dengan jumlah nominal tertentu di dalam aplikasi yang dapat diakses melalui *Handphone* sehingga dapat menjadi lebih praktis penggunaannya. Saat ini, di Indonesia terdapat beberapa aplikasi dompet digital yang populer seperti OVO, GoPay, Dana, LinkAja dan lainnya (Yuliati & Handayani, 2021). Selain itu, terdapat pula alternatif pembayaran dengan menggunakan QR (*Quick Response*) Code. Mekanisme pembayaran digital ini hanya perlu waktu singkat saja sampai transaksi dinyatakan berhasil dan bukti transaksi secara otomatis akan terkirim ke dalam riwayat transaksi konsumen (Amanda & Tambunan, 2022).

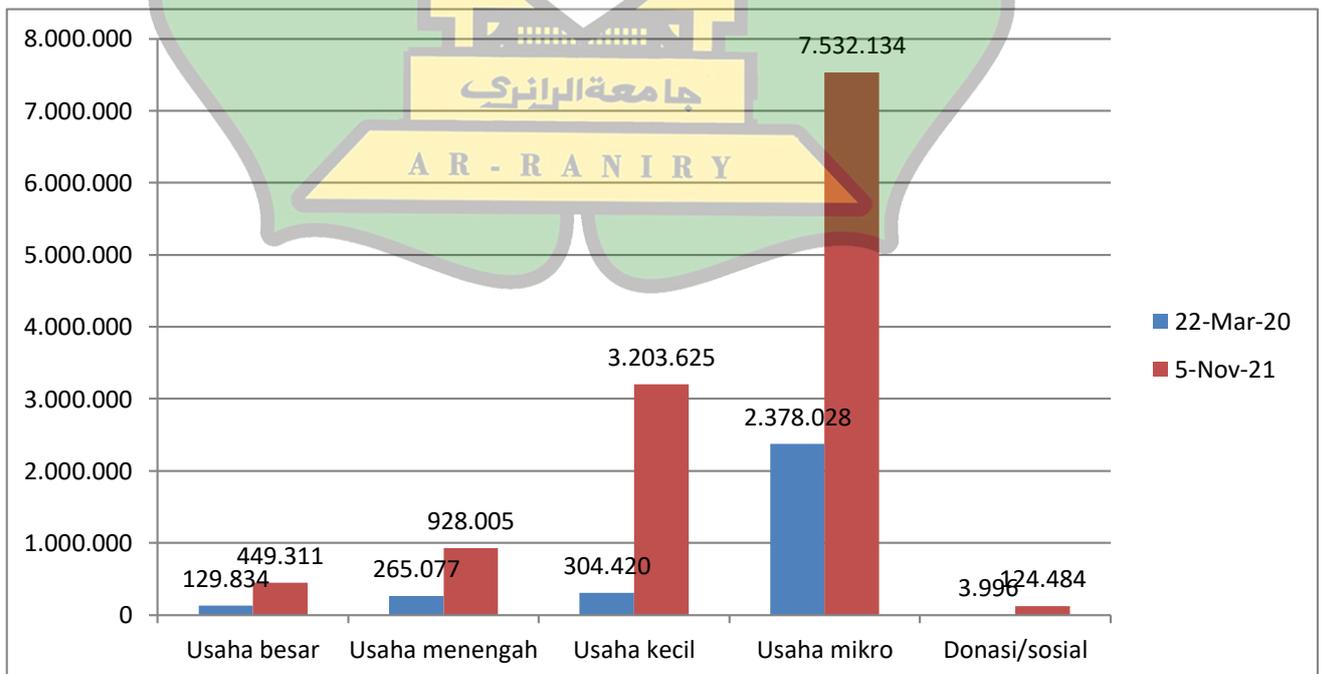
Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran di Indonesia, telah meluncurkan metode pembayaran yang berbasis *shared delivery channel* untuk instrumen pembayaran yang berbasis server yaitu dengan nama *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Metode pembayaran ini digunakan untuk menstandarisasi seluruh pembayaran non-tunai yang menggunakan Kode QR. Salah satu alasan diperkenalkannya metode pembayaran ini adalah karena para pedagang di pasar atau *marketplace* ketika dalam bertransaksi non-tunai harus menyediakan banyak Kode QR dari berbagai penerbit (Nasution, 2021).

Penggunaan kode QR merupakan sistem pembayaran yang sedang mengalami *trend*. Dengan kode QR bisa memuat berbagai informasi di dalamnya seperti alamat URL, teks hingga nomor telepon, dan lainnya. Kode QR biasanya ditempatkan pada berbagai produk untuk menampilkan informasi-informasi tentang produk tersebut. Selain itu, Kode QR ini dapat memasangnya di kartu nama sebagai tambahan informasi. Keunggulan yang dimiliki Kode QR di antaranya adalah penyimpanan dan pemanfaatan data yang akurat serta keunggulan fisik yang tahan lama (Setiawan & Mahyuni, 2020).

QRIS merupakan sebuah standar nasional Kode QR yang diwajibkan bagi seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang menggunakan sistem *QR Code*. Dengan adanya standar QRIS seluruh aplikasi pembayaran dari PJSP apapun dapat melakukan pembayaran menggunakan Kode QR di seluruh *Merchant* (penjual barang atau jasa) meskipun PJSP yang digunakan berbeda. Selain itu, dapat memudahkan *Merchant* dalam bentuk penerimaan pembayaran dari aplikasi apapun hanya dengan membuka akun pada salah satu PJSP penyelenggara QRIS. *Merchant* yang memiliki lebih dari satu Kode QR dari berbagai PJSP yang berbeda juga dimudahkan karena seluruh akun yang dimilikinya dapat menerima pembayaran hanya dengan satu Kode QR yakni dengan menggunakan aplikasi QRIS (Nasution, 2020) Adapun perkembangan data pengguna QRIS di Indonesia tahun 2020-2021 sebagai berikut:

Gambar 1.1

Perkembangan Pengguna QRIS Oleh Pedagang/Merchant Tahun 2020-2021 Di Indonesia



Sumber: Katadata (2021)

Berdasarkan Gambar 1.1, dapat dijelaskan jumlah *Merchant* pengguna QRIS pada 5 November 2021 telah menyentuh angka 12,2 juta. Angka ini meningkat pesat hingga 297,1% dibandingkan pada tahun 2020 hanya sebanyak 3,08 juta *Merchant*. Saat ini, *Merchant* pada usaha mikro paling banyak terdaftar QRIS, yakni mencapai 7,53 juta pada 5 November 2021. Diikuti *Merchant* usaha kecil (UK) sebanyak 3,2 juta dan usaha menengah (UM) sebanyak 928 ribu. Usaha besar (UB) memiliki 449,3 ribu *Merchant* yang terdaftar QRIS. Sementara, dari sektor donasi/sosial memiliki 124,5 ribu *Merchant* yang telah terdaftar QRIS. Untuk memperluas pengguna QRIS, Bank Indonesia memberikan sejumlah biaya insentif kepada *Merchant* seperti memperpanjang *Merchant* discount rate (MDR) QRIS sebesar 0% bagi usaha mikro hingga 31 Desember 2021 serta menaikkan *limit* atau batas transaksi QRIS dari Rp2 juta per transaksi menjadi Rp5 juta per transaksi (Katadata, 2021).

Untuk mewujudkan sistem pembayaran yang mudah, aman, dan efisien, penggunaan QRIS ini dapat diterapkan pada aplikasi-aplikasi pembayaran yang telah diunduh di *smartphone* serta terhubung dengan koneksi internet dengan sebuah aplikasi pembaca QR. Teknologi ini dianggap sebagai cara yang inovatif dalam memberi kemudahan dalam berbagai aktivitas sistem yang ada karena memberikan kecepatan pendataan. Aplikasi-aplikasi yang dimaksud ialah *E-wallet* (penerbit dari perbankan maupun bukan) yang digunakan sebagai instrumen pembayaran berbasis server yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia (Ginatra et al., 2020).

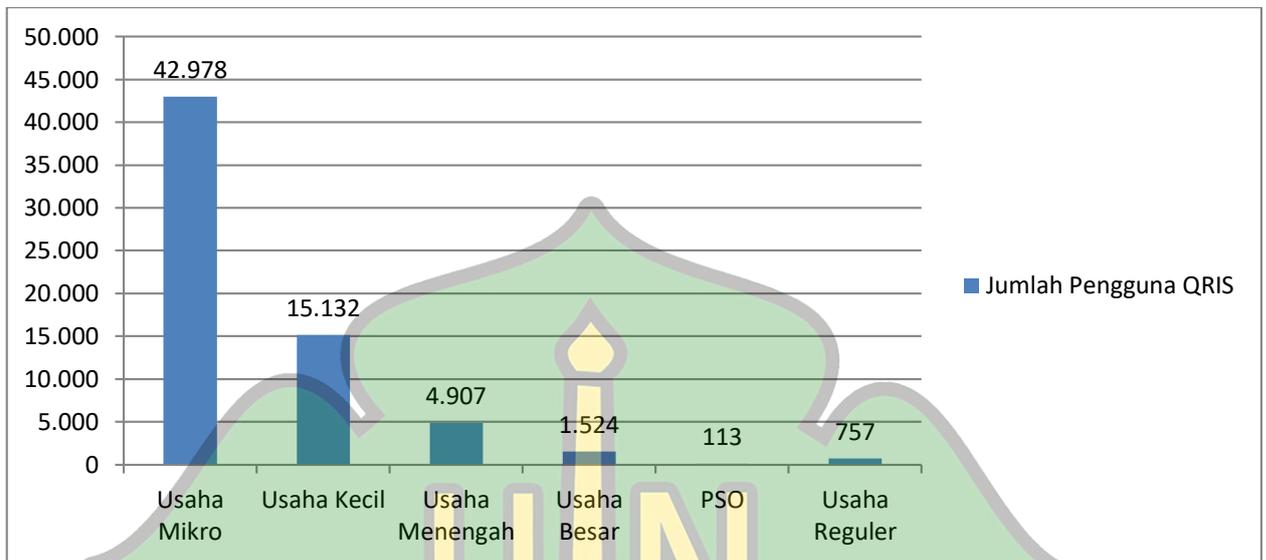
Penggunaan Qris Saat ini tak terlepas dari para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah mendominasi mendominasi di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM memiliki peran sangat penting dalam membangun kestabilan perekonomian masyarakat yang terbukti saat ini jenis usaha ini masih berdiri kokoh disaat usaha besar lainnya banyak berjatuh semenjak pandemi. Pada tahun 2021 Ada sebanyak 64,2 juta usahawan yang tersebar penjurur negeri dengan menyerap tenaga kerja 119 juta pekerja atau menyerap tenaga kerja sebesar 97% di dunia usaha di Indonesia (Mahyuni & Setiawan, 2021).

Keberadaan UMKM menjadi sumber mata pencaharian masyarakat yang dimana angka pengangguran di Aceh terus meningkat sehingga menjadi alternatif lapangan pekerjaan. Termasuk halnya di kota Banda Aceh yang merupakan pusat kegiatan ekonomi di Aceh. Kota ini juga dianggap sebagai kota dengan kawasan strategis dalam sektor perdagangan dengan memiliki potensi, aksesibilitas, dan sebaran kegiatan sektor di wilayah kota dan sekitarnya (Maisarina, Irwansyah, & Izziah, 2017). Kota Banda Aceh juga menjadi salah satu wilayah dengan persebaran UMKM terbanyak di provinsi Aceh. Dalam pernyataannya, Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman menyebutkan angka perkembangan usahawan UMKM di Kota Banda

Aceh telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun, bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Banda aceh mengalami pertumbuhan sangat pesat dari total 8.900 unit pada 2016 menjadi 17.080 unit di tahun 2022. Dapat dirincikan, pada 2016 jumlah UMKM dikota Banda Aceh sebanyak 8.900 unit. Di tahun 2017 menunjukkan peningkatan menjadi 9.591. Lalu bertambah lagi menjadi 10.944 berlanjut ke tahun ke 2019 mencapai 12.012, lalu 2020 meningkat lagi hingga 15.107 unit. 2021 sebanyak 16.970 usaha, dan hingga Februari 2022 sudah mencapai 17.308 unit usaha. Yang artinya UMKM dikota Banda Aceh terus mengalami pertumbuhan dari tahun 2017 ke tahun 2022 hingga 92 persen (Antaraneews, 2022)

Seiring bertambahnya para pelaku UMKM di Banda Aceh, diperlukan teknologi pembayaran non-tunai untuk mendukung upaya oleh Bank Indonesia dalam meningkatkan jumlah *Merchant* yang terintegrasi dengan QRIS dengan tujuan pemerataan FinTech sebagai wujud target era Industri 4.0 di Indonesia (Mahyuni & Setiawan, 2021). Ada beberapa cara untuk mewujudkan hal tersebut salah satunya pemerintah kota Banda Aceh meluncurkan program *Smart City* (kota cerdas). Walikota Aminullah Usman dalam *Smart City* Kota Banda Aceh (2021) mengatakan melalui program ini yang nantinya masyarakat dapat melakukan transaksi hanya dengan *scan* kode QR saja di seluruh *Merchant* atau pedagang termasuk pengusaha UMKM yang menerima transaksi pembayaran melalui aplikasi QR yang dapat terkoneksi dengan QR dan dengan program ini, diharapkan semua masyarakat di kota Banda Aceh bisa bertransaksi dengan mudah, hanya menggunakan aplikasi QRIS sehingga dapat membangun kemajuan visi dan misi *smart city* dan juga memulihkan perekonomian di Aceh setelah pandemi. Kepala bank Indonesia provinsi Aceh, Achris Sarwani dalam KBA.One (2021) mengatakan jumlah usahawan Aceh yang menggunakan QRIS di tahun 2021 sebanyak 65 ribu *Merchant*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram berikut.

Gambar 1.2
Jumlah Pengguna QRIS Tahun 2022 di kota Banda Aceh



Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan gambar 1.1, dapat dijelaskan pengguna QRIS di Banda Aceh didominasi Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UKE), Usaha Menengah (UME), Usaha Besar (UBE), Public Service Obligation (PSO) dan Usaha Reguler (URE) seperti donasi/sosial, yayasan, dan lain sebagainya. Disektor UMI dengan 42.978 *Merchant* pengguna, UKE 15.132 pengguna, UME 4.907 pengguna, UBE 1.524 pengguna, PSO 113 pengguna dan URE 757 pengguna yang dapat disimpulkan pengguna QRIS aktif di Aceh didominasi oleh sektor UMKM berjumlah 63.017 *Merchant*. Hal ini menunjukkan bahwa dari 74.810 UMKM di Aceh, yang masih belum atau tidak menggunakan aplikasi QRIS ada sebanyak 11.793 unit UMKM.

Seperti disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Wibowo dalam Sartika (2022), hambatan terbesar dalam implementasi QRIS adalah literasi keuangan digital masyarakat yang masih cukup rendah yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap QRIS masih belum utuh. Ditambah lagi adanya pengenaan atau potongan biaya atas transaksi sebesar 0,7 persen. Oleh karena itu, literasi keuangan menjadi kendala utama bagi pelaku usaha khususnya UMKM maupun masyarakat yang ingin menggunakan QRIS. Hal ini disebabkan anggapan masyarakat yang masih awam akan FinTech. Adapun kendala lainnya, masyarakat dan pelaku UMKM masih kurang memahami informasi serta cara penggunaan QRIS itu sendiri karena kebanyakan masyarakat saat ini masih melakukan transaksi dengan menggunakan uang tunai atau metode manual.

Hal ini juga didukung beberapa penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2022) yang menyatakan kendala yang dihadapi oleh BSI di Aceh dan nasabah dalam mengimplementasikan QRIS seperti tingkat literasi keuangan digital masyarakat di daerah terpencil dan kota-kota kecil yang masih rendah, Jaringan internet yang masih terkonsentrasi di pusat kota, nasabah masih banyak yang melakukan transaksi tunai dibandingkan transaksi non-tunai, dan adanya pengenaan biaya 0,7% dari nilai transaksi pembayaran UMKM sehingga dibutuhkan Strategi dalam mengimplementasikan aplikasi QRIS pada nasabah BSI di Aceh.

Dari *research gap* di atas maka terdapat beberapa hasil implementasi QRIS memunculkan kendala dan tantangan tersendiri dalam penerapannya. Maka dengan adanya penelitian baru untuk membuktikan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memberikan jawaban atas penelitian ini serta memberikan gambaran mengenai implementasi aplikasi QRIS bagi UMKM yang diharapkan dapat memberikan referensi dalam implementasi QRIS bagi UMKM kedepannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian bagaimana penggunaan aplikasi QRIS bagi pelaku UMKM dalam bentuk skripsi dengan judul **“Problematika Penerapan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* Bagi UMKM di Aceh (Studi Kasus UMKM di Kota Banda Aceh).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana mekanisme penerapan Aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* Bagi UMKM di kota Banda Aceh?
2. Bagaimana tantangan dalam penerapan Aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* Bagi UMKM di kota Banda Aceh?
3. Bagaimana solusi dalam penerapan Aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* Bagi UMKM di kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apa saja mekanisme penerapan Aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* Bagi UMKM di kota Banda Aceh?
2. Mengetahui tantangan dalam penerapan Aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* Bagi UMKM di di kota Banda Aceh.

3. Mengetahui solusi dalam penerapan Aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Bagi UMKM di di kota Banda Aceh?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian Pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai implementasi Aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Bagi UMKM di Aceh.

2. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta referensi tambahan kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM dalam mengimplementasikan aplikasi QRIS.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut di akademik.

1.5 Sistematika Pembahasan

1. BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika Penelitian.

2. BAB II: Landasan Teori

Bab ini terdiri dari teori-teori yang menyangkut dengan penelitian, Penelitian terdahulu, dan disertai dengan kerangka berfikir

3. BAB III: Metodologi Penelitian

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik keabsahan data

4. BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan Problematika penerapan Aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Bagi UMKM di Aceh.

5. BAB V: Penutup

Bab ini diisi dengan kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan serta saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 *Financial Technology* (FinTech)

2.1.1 Pengertian FinTech

Financial technology (FinTech) merupakan suatu istilah yang di gunakan guna menggambarkan teknologi yang digunakan dalam industri keuangan. FinTech bisa berbentuk aplikasi aplikasi, ataupun platform yang digunakan buat tingkatan efisiensi, kurangi bayaran serta tingkatan akses layanan keuangan. FinTech bisa meliputi bermacam berbagai teknologi, semacam teknologi blockchain, fitur lunak keuangan, analitik big informasi serta teknologi mobile. FinTech dimaksud sesuatu upaya industri ataupun organisasi yang memakai teknologi untuk menyediakan produk ataupun layanan keuangan yang lebih efektif serta efisien Dengan kata lain FinTech merupakan industri yang memakai teknologi guna meningkatkan ataupun mengambil alih produk serta layanan keuangan tradisional (Nurchaya & Dewi, 2019).

Menurut peraturan Bank Indonesia No.18/22/DKSP tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan digital, FinTech didefinisikan sebagai penggunaan teknologi berbasis mobile atau web dalam kegiatan layanan sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan inklusi keuangan. Inklusi keuangan atau *Financial Inclusion* merupakan usaha untuk mengurangi hambatan yang bersifat harga maupun non harga yang menghambat akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Bank Indonesia juga mengakui bahwa FinTech dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan dan menyediakan layanan keuangan yang lebih terjangkau bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan FinTech adalah teknologi yang digunakan untuk meningkatkan layanan keuangan dengan cara mempermudah, mempercepat, dan memperluas akses layanan keuangan. FinTech juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dalam proses transaksi keuangan.

2.1.2 Jenis-Jenis FinTech

Saat ini perkembangan FinTech di Indonesia sangatlah pesat dan telah banyak berdiri perusahaan yang mengembangkan layanan keuangan berbasis teknologi. Dikutip dari Gramedia (2021) Ada beberapa beberapa jenis-jenis FinTech di antaranya:

1. *Crowdfunding*

Menurut Beik & Arsyianti (2016) *Crowdfunding* adalah proses mengumpulkan dana dari banyak orang melalui internet untuk menyediakan dana bagi proyek atau bisnis tertentu. *Crowdfunding* biasanya digunakan untuk proyek-proyek kreatif, teknologi, atau usaha kecil yang memerlukan dana untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka.

Crowdfunding dapat dilakukan melalui berbagai platform *online* yang menyediakan sarana untuk mengumpulkan dana dari investor atau donatur. Beberapa platform *Crowdfunding* juga menyediakan fitur-fitur seperti pembagian keuntungan atau kompensasi bagi para investor. Ada beberapa jenis *Crowdfunding* (Putri, 2020) yaitu:

- 1) *Reward-based Crowdfunding*: pemberi dana akan mendapatkan reward yang telah ditentukan oleh penerima dana.
- 2) *Equity-based Crowdfunding*: pemberi dana akan mendapatkan kepemilikan saham dari perusahaan yang menerima dana.
- 3) *Debt-based Crowdfunding*: pemberi dana akan mendapatkan bunga dari pinjaman yang diberikan kepada perusahaan yang menerima dana.
- 4) *Donation-based Crowdfunding*: pemberi dana hanya memberikan donasi tanpa ada imbalan tertentu.

Crowdfunding menjadi alternatif yang menarik bagi perusahaan atau individu yang memerlukan dana, karena dapat mengumpulkan dana dari banyak orang dengan cepat dan efisien. Namun, ada risiko yang harus dipertimbangkan, seperti risiko gagalnya proyek atau tidak adanya jaminan pengembalian dana (Rachmaniyah & Nugroho, 2019).

2. *Microfinancing*

Menurut *Consultative Group Assist the Poor* atau *CGAP* (2013) dalam (Mamuko, Masruchin, & Krisnaningsih, 2022) *Microfinancing* adalah layanan keuangan yang diberikan kepada individu atau kelompok kecil yang tidak memiliki akses ke sumber pembiayaan tradisional, seperti bank. Dalam *FinTech*, *Microfinancing* mencakup penyediaan pinjaman kecil atau modal usaha kepada individu atau kelompok yang tidak memiliki akses ke jalur pembiayaan tradisional seperti bank. Ini dapat dilakukan melalui aplikasi atau platform digital yang memungkinkan individu atau kelompok untuk mengajukan pinjaman secara online, tanpa harus melalui proses yang rumit dan memakan waktu. *Microfinancing* dalam *FinTech* juga dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang berada di daerah pedesaan atau terpencil, yang sering kali kesulitan mengakses jasa keuangan tradisional. Dengan menggunakan teknologi platform digital

dapat menjangkau masyarakat yang berada jauh dari bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga membuat proses pembiayaan lebih mudah dan terjangkau. Selain itu, *Microfinancing* juga dapat digunakan untuk meningkatkan inklusi keuangan. Dengan memberikan akses kepada individu atau kelompok yang sebelumnya tidak memiliki akses ke jalur pembiayaan tradisional, *Microfinancing* dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan finansial masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau (Mamuko et al., 2022)

Namun, *Microfinancing* juga memiliki risiko yang harus diperhatikan seperti risiko kredit dan risiko likuiditas. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang memastikan agar *Microfinancing* yang dijalankan memenuhi standar keamanan dan transparansi yang baik, dan agar masyarakat dapat dijangkau dengan cara yang aman dan efektif (Purwanto, Yandri, & Yoga, 2022).

3. *Market Comparison*

Market Comparison adalah suatu proses perbandingan produk keuangan yang ditawarkan oleh berbagai lembaga keuangan (Gramedia, 2021). Dalam FinTech, *Market Comparison* dapat dilakukan melalui aplikasi atau platform digital yang menyediakan informasi produk keuangan dari berbagai lembaga keuangan dan memungkinkan pengguna untuk membandingkan berbagai produk tersebut berdasarkan kriteria yang ditentukan, seperti suku bunga, jangka waktu, atau biaya administrasi (Dewi, Mardiana, & Karolina, 2023).

Dengan kata lain, *Market Comparison* adalah proses membandingkan produk keuangan yang ditawarkan oleh berbagai lembaga keuangan dengan menggunakan aplikasi atau platform digital. Contohnya adalah aplikasi atau platform yang menyediakan informasi dan perbandingan produk kartu kredit dari berbagai bank, aplikasi atau platform yang menyediakan perbandingan produk deposito dari berbagai bank, atau platform atau aplikasi yang menyediakan perbandingan produk asuransi dari berbagai perusahaan asuransi. Ini dapat membantu konsumen untuk membuat keputusan yang informatif dan bijak dalam memilih produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka (Disemadi et al., 2022).

Namun hasil dari *Market Comparison* tidak selalu memberikan jawaban pasti, karena kadang-kadang hasil dari *Market Comparison* tidak mencakup semua produk yang tersedia di pasar, atau bahkan produk yang sama ditawarkan dengan harga atau kondisi

yang berbeda. Oleh karena itu, sangat penting bagi konsumen untuk melakukan riset dan analisis tambahan sebelum membuat keputusan (Purwanto et al., 2022).

4. *P2P Lending Service*

P2P Lending Service dalam FinTech adalah layanan pinjam-meminjam uang yang dilakukan secara *peer-to-peer (P2P)* dengan menggunakan teknologi finansial. Dalam layanan ini, pemberi pinjaman dan peminjam bertemu dan berkomunikasi secara langsung melalui platform yang dikelola oleh perusahaan FinTech. Contohnya adalah platform yang menyediakan layanan *P2P lending* secara *online* dan menggunakan algoritma yang canggih untuk mengevaluasi risiko pinjaman dan menyaring peminjam yang layak (Syarifudin, 2020)

Selain itu, layanan *P2P Lending* dalam FinTech juga menawarkan kemudahan dan keringanan dalam proses pinjam-meminjam uang. Peminjam dapat mengajukan pinjaman secara *online*, tanpa harus mengunjungi bank atau kantor perusahaan FinTech, dan pemberi pinjaman dapat melakukan investasi dengan jumlah uang yang relatif kecil. Beberapa platform juga menawarkan fitur-fitur seperti pembagian risiko antar pemberi pinjaman, yang memungkinkan pemberi pinjaman untuk meminjamkan uangnya ke beberapa peminjam sekaligus dan membagikan risiko dari pinjaman tersebut. Layanan ini mengutamakan pengambilan keputusan yang didasarkan pada data digital yang terkumpul dari peminjam, seperti data keuangan dan aktivitas online, yang digunakan untuk mengevaluasi risiko pinjaman. Contoh platform *P2P Lending* yang ada di Indonesia adalah seperti KoinWorks, Investree, dan Modalku (Destiya, 2019).

5. *Digital Payment System*

Digital Payment System adalah sistem pembayaran yang menggunakan teknologi digital seperti internet, smartphone, atau kartu kredit untuk melakukan transaksi. Ini mencakup berbagai metode seperti pembayaran mobile, *E-Wallet*, dompet digital, dan sistem pembayaran *online* lainnya (Gramedia, 2021). FinTech menyediakan berbagai platform dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi secara cepat, mudah, dan aman. *Digital Payment System* menawarkan kemudahan bagi pengguna dan juga mengurangi biaya transaksi untuk perusahaan dan lembaga keuangan (Saragih & Nopriadi, 2019).

Digital Payment System juga meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pembayaran. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengecek riwayat

transaksi, mengatur pengeluaran, dan mengelola dana dengan mudah. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan keamanan transaksi dengan menggunakan teknologi enkripsi dan autentikasi yang kuat. *Digital Payment System* juga dapat digunakan untuk berbagai jenis transaksi, seperti pembayaran tagihan, pembelian produk dan jasa, dan transfer uang. Beberapa sistem pembayaran digital juga dapat digunakan untuk pembayaran internasional dan pembayaran dengan mata uang asing. Beberapa contoh *Digital Payment System* dalam FinTech di Indonesia antara lain: Gopay, OVO, DANA, dan Link Aja (Syarifudin, 2020).

2.1.3 Tujuan dan Manfaat FinTech

Tujuan utama dari FinTech adalah untuk meningkatkan efisiensi, membuat layanan keuangan lebih mudah diakses, dan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh konsumen dan perusahaan. Hal ini dicapai melalui penggunaan teknologi seperti aplikasi mobile, blockchain, dan analitik data untuk meningkatkan layanan keuangan tradisional seperti perbankan, asuransi, dan investasi. Manfaat dari FinTech dapat dilihat dari berbagai aspek (Sijabat, Hutajulu, & Sihombing, 2019) di antaranya:

1. Inklusi keuangan: FinTech dapat membuat layanan keuangan lebih mudah diakses bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses yang cukup.
2. Efisiensi: FinTech mengurangi biaya transaksi dan membuat proses transaksi lebih cepat dan mudah.
3. Transparansi: FinTech menyediakan informasi yang lebih detail dan transparan kepada konsumen, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang lebih baik.
4. Kemudahan Akses: FinTech memberikan kemudahan akses ke layanan keuangan bagi konsumen yang tidak memiliki akses ke layanan tradisional, seperti perbankan atau asuransi.
5. Personalisasi: FinTech menyediakan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, sehingga konsumen dapat memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
6. Analitik Data: FinTech menggunakan analitik data untuk meningkatkan layanan keuangan dan memberikan rekomendasi yang lebih baik bagi konsumen.

Secara keseluruhan, FinTech dapat membuat layanan keuangan lebih efisien, mudah diakses, dan murah bagi konsumen dan perusahaan. FinTech juga mengungkapkan risiko-risiko baru, seperti keamanan data dan risiko regulasi yang harus diperhatikan.

2.1.4 Regulasi dalam *Financial Technology* (FinTech)

Regulasi FinTech menjadi sangat penting, mengingat produk FinTech tergolong baru di dunia keuangan, di Indonesia belum banyak regulasi mengenai kegiatan FinTech, sehingga banyak hal yang masih menimbulkan masalah. Keberadaan industri FinTech di Indonesia saat ini diatur oleh lembaga yang berwenang untuk melindungi hak-hak pengguna produk FinTech. Dalam hal ini, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengeluarkan peraturan untuk mengatur perkembangan FinTech di Indonesia. Kebijakan tersebut meliputi:

- 1) Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PB1/2016 tentang penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- 2) Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP tahun 2016 perihal layanan keuangan digital.
- 3) Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang uang elektronik.

2.1.5 Peran FinTech dalam pembayaran

FinTech sebagai alat atau teknologi mempermudah transaksi antara pembeli dan penjual serta dapat mengurangi celah atau kecurangan dalam proses bisnis. FinTech juga bisa disebut sebagai proses pembayaran yang legal tanpa menggunakan instrumen kertas, dimana FinTech dapat menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Dalam hal sistem pembayaran, FinTech dapat berperan sebagai (Nurchahya & Dewi, 2019):

- 1) Menyediakan pasar bagi pengusaha.
- 2) Menjadi alat pembayaran/penyelesaian dan pelunasan.
- 3) Membantu membuat investasi menjadi lebih efisien.
- 4) Pengurangan risiko yang timbul dari sistem pembayaran tradisional/konvensional.
- 5) Membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam uang dan menginvestasikan modal

2.2 QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)

2.2.1 Sejarah QR (*Quick Response*) Code

QR Code atau *Quick Response code* adalah jenis kode matriks dua dimensi yang dapat menyimpan informasi dalam bentuk teks atau data numerik. QR Code pertama kali dikembangkan pada tahun 1994 oleh perusahaan otomotif Jepang, *Denso Wave*, sebagai cara untuk melacak kendaraan selama proses manufaktur. QR Code pertama kali digunakan secara luas di Jepang pada tahun 2002, ketika operator telepon seluler Jepang NTT DoCoMo mulai

menggunakannya sebagai cara untuk memfasilitasi pembayaran elektronik. Dalam beberapa tahun kemudian, *QR Code* mulai digunakan di seluruh dunia dalam berbagai aplikasi, termasuk pembayaran elektronik, pemasaran, dan identifikasi barang (Widayati, 2017).

Seiring dengan perkembangan teknologi, *QR Code* telah berkembang menjadi jenis kode matriks dua dimensi yang paling populer dan banyak digunakan di seluruh dunia. *QR Code* sekarang digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk di dalam aplikasi mobile, untuk pembayaran, penandaan produk, pemasaran, dan lainnya (Qashlim & Hasruddin, 2015).

Pada tahun 2011, perusahaan teknologi asal Amerika, Google, mulai menggunakan *QR Code* di Google Places, yang memungkinkan pengguna untuk membuka halaman profil bisnis melalui ponsel mereka dengan memindai *QR Code*. Kemudian, pada tahun 2014, Apple mengumumkan dukungan untuk pemindai *QR Code* di aplikasi kamera bawaan iOS mereka.

Secara keseluruhan, *QR Code* adalah salah satu jenis kode matriks dua dimensi yang paling populer dan banyak digunakan di seluruh dunia, dan terus berkembang sebagai bagian dari solusi digital dan teknologi informasi. *QR Code* juga memiliki keuntungan lain yang membuatnya populer, yaitu kemampuan untuk menyimpan lebih banyak data daripada kode batang tradisional. *QR Code* dapat menyimpan hingga 7.089 karakter numerik atau 4.296 karakter alfanumerik dalam satu kode. Hal ini memungkinkan *QR Code* digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk untuk membawa informasi produk atau layanan secara lengkap, menyimpan informasi kontak, menyediakan informasi tur lengkap untuk wisatawan, atau untuk menyimpan informasi personal seperti kartu nama digital. Selain itu, *QR Code* juga dapat dibaca dengan cepat dan mudah menggunakan perangkat mobile yang dilengkapi dengan kamera dan aplikasi pembaca *QR Code*. Ini membuatnya lebih mudah digunakan daripada kode batang tradisional, yang membutuhkan pembaca khusus (Habibi, Masruro, & Khonsa, 2020).

Dalam perkembangannya, *QR Code* juga telah diadaptasi menjadi berbagai bentuk, seperti *QR Code* dengan logo atau desain khusus untuk keperluan branding atau pemasaran, dan juga *QR Code* yang dapat diakses secara *online* melalui tautan web. Saat ini, *QR Code* terus digunakan dan berkembang dalam berbagai aplikasi, seperti pembayaran elektronik, identifikasi barang, logistik, pemasaran, dan lainnya. *QR Code* telah menjadi bagian penting dalam solusi digital dan teknologi informasi di era yang semakin terkoneksi dan *mobile* (Rumondang, Sudirman, Effendy, Simarmata, & Agustin, 2019).

2.2.2 Definisi QRIS

Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat QRIS adalah penyatuan berbagai macam *QR* dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan

QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan *QR Code* dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menggunakan *QR Code* Pembayaran wajib menerapkan QRIS (Febrinda & Ningsih, 2023).

Menurut bank Indonesia, *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) adalah sebuah standar kode QR yang dibuat oleh Bank Indonesia untuk memudahkan transaksi keuangan non-tunai di Indonesia. QRIS berbeda dengan *QR Code* biasa karena memiliki format standar yang dapat digunakan oleh semua bank dan penyedia layanan pembayaran di Indonesia. QRIS menggabungkan informasi seperti nama *Merchant*, nomor rekening, dan jumlah transaksi ke dalam satu kode QR, sehingga memudahkan konsumen untuk melakukan pembayaran hanya dengan memindai kode QR tersebut. QRIS juga memungkinkan transaksi pembayaran dilakukan menggunakan berbagai metode pembayaran non-tunai, seperti transfer bank, e-wallet, atau kartu kredit (Bank Indonesia, 2023). QRIS memiliki beberapa keuntungan, di antaranya adalah mempercepat proses pembayaran dan memudahkan transaksi keuangan non-tunai. QRIS juga dapat mengurangi biaya transaksi karena tidak memerlukan infrastruktur yang rumit dan mahal seperti mesin EDC (*Electronic Data Capture*) atau terminal pembayaran (Febrinda & Ningsih, 2023).

Saat ini QRIS telah diterapkan di seluruh Indonesia dan telah diadopsi oleh berbagai pihak, termasuk bank, FinTech, dan *merchant*. Dalam waktu singkat, QRIS telah menjadi metode pembayaran non-tunai yang paling populer di Indonesia, bahkan di sektor mikro dan kecil. Dengan adopsi QRIS yang semakin luas, Bank Indonesia berharap bahwa QRIS dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong transaksi non-tunai di Indonesia, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di masa depan (Nasution, 2021).

2.2.3 Landasan Hukum QRIS

Landasan hukum dari implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang memberikan wewenang Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi sistem pembayaran di Indonesia.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.

3. Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/119/KEP/DIR tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Quick Response Code (QR Code) Untuk Pembayaran, yang menetapkan standar kode QR untuk pembayaran yang dapat digunakan oleh semua bank dan penyedia layanan pembayaran di Indonesia.
4. Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/120/KEP/DIR tentang Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Untuk Pembayaran, yang menetapkan standar QRIS sebagai format kode QR yang harus digunakan oleh semua bank dan penyedia layanan pembayaran di Indonesia.

Dengan landasan hukum ini, Bank Indonesia berharap dapat memastikan keamanan, kehandalan, dan interoperabilitas QRIS dalam sistem pembayaran di Indonesia, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam transaksi keuangan non-tunai.

2.2.4 Standarisasi QRIS

Standarisasi QRIS telah ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/120/KEP/DIR tentang QRIS untuk Pembayaran pada tanggal 15 Agustus 2018. Standar ini menetapkan format kode QR yang harus digunakan oleh semua bank dan penyedia layanan pembayaran di Indonesia. Format QRIS terdiri dari beberapa elemen informasi yang harus tercakup dalam kode QR (Mayanti, 2020), yaitu:

1. ID QRIS: merupakan identifikasi unik untuk setiap kode QR yang diterbitkan oleh *Merchant* atau penyedia layanan pembayaran.
2. ID Bank: merupakan kode identifikasi bank yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
3. ID *Merchant*: merupakan identifikasi unik untuk setiap merchant yang menerima pembayaran melalui QRIS.
4. ID Transaksi: merupakan identifikasi unik untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh konsumen.
5. Jumlah Pembayaran: mencakup informasi jumlah pembayaran dalam rupiah.
6. Data tambahan (opsional): dapat mencakup informasi tambahan seperti nomor rekening, nama pemilik rekening, dan informasi lainnya yang relevan dengan transaksi pembayaran.

Tujuan standarisasi QRIS adalah untuk menciptakan sistem pembayaran yang lebih mudah, cepat, dan efisien di Indonesia. QRIS adalah standar nasional untuk kode QR yang digunakan dalam pembayaran elektronik. QRIS memungkinkan para pelaku usaha, termasuk pedagang kecil dan menengah, untuk menerima pembayaran elektronik dengan mudah tanpa perlu memiliki infrastruktur teknologi yang mahal.

2.2.5 Manfaat QRIS

Saat ini, QRIS memiliki banyak manfaat bagi pemerintah dan masyarakat terutama masyarakat Indonesia yang terlibat dalam melakukan transaksi pembayaran menggunakan QRIS (Dwijayanti et al., 2022). Adapun manfaatnya antara lain:

1. Meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi keuangan non-tunai. QRIS memungkinkan transaksi pembayaran non-tunai yang lebih cepat, mudah, dan transparan. QRIS juga dapat mengurangi biaya administrasi dan operasional untuk bisnis dan pengguna, karena tidak memerlukan biaya cetak dan distribusi kartu atau pembayaran melalui mesin EDC (*Electronic Data Capture*).
2. Meningkatkan inklusi keuangan. QRIS dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke sistem pembayaran formal. QRIS dapat digunakan oleh siapa saja yang memiliki ponsel pintar dan rekening bank atau e-wallet.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan memudahkan transaksi pembayaran non-tunai, QRIS dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. QRIS juga dapat membantu bisnis kecil dan menengah untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan akses ke pasar yang lebih besar.
4. Meningkatkan keamanan transaksi. QRIS dilengkapi dengan fitur keamanan yang mencegah penipuan dan pembajakan data, seperti enkripsi dan otentikasi.
5. Meningkatkan interoperabilitas sistem pembayaran. QRIS mengintegrasikan berbagai metode pembayaran non-tunai, seperti transfer bank, e-wallet, atau kartu kredit, sehingga memudahkan konsumen untuk melakukan pembayaran menggunakan metode yang paling mudah dan nyaman bagi mereka.
6. Meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian. QRIS memungkinkan Bank Indonesia untuk memantau dan mengendalikan sistem pembayaran dengan lebih efektif dan efisien. QRIS juga dapat membantu bank dan penyedia layanan pembayaran dalam memperbaiki manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

2.2.6 Jenis-jenis Pembayaran QRIS

Menurut Bank Indonesia, ada tiga jenis pembayaran dalam menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) (Sekarsari, Indrawati, & Subarno, 2021), yaitu:

1. QRIS *Consumer-presented Mode*: Jenis pembayaran ini melibatkan konsumen yang memindai kode QRIS yang ditampilkan oleh merchant atau penjual menggunakan

aplikasi pembayaran di ponsel pintar mereka. Setelah kode QRIS berhasil dipindai, konsumen dapat melakukan pembayaran dengan mengikuti instruksi pada aplikasi pembayaran. Jenis pembayaran ini dapat dilakukan menggunakan *E-Wallet*, kartu kredit atau debit, transfer bank, atau sistem pembayaran lainnya.

2. *QRIS Merchant-Presented Mode*: Jenis pembayaran ini melibatkan merchant atau penjual yang menampilkan kode QRIS mereka pada layar monitor atau ponsel pintar mereka. Konsumen dapat melakukan pembayaran dengan mengarahkan kamera ponsel pintar mereka ke kode QRIS tersebut dan mengikuti instruksi pada aplikasi pembayaran. Jenis pembayaran ini juga dapat dilakukan menggunakan *E-Wallet*, kartu kredit atau debit, transfer bank, atau sistem pembayaran lainnya.
3. *QRIS Mobile Banking Mode*: Jenis pembayaran ini melibatkan konsumen yang melakukan pembayaran menggunakan aplikasi *mobile banking* dari bank tempat mereka membuka rekening. Konsumen dapat memilih menu pembayaran QRIS di aplikasi *mobile banking* dan memindai kode QRIS yang ditampilkan oleh merchant atau penjual. Jenis pembayaran ini hanya dapat dilakukan menggunakan transfer bank.

Penting untuk diingat bahwa jenis pembayaran dalam QRIS tergantung pada aplikasi pembayaran yang digunakan dan *merchant* atau penjual yang menerima pembayaran. Beberapa *merchant* atau penjual mungkin hanya menerima pembayaran menggunakan *E-Wallet* atau kartu kredit, sedangkan yang lain mungkin menerima semua jenis pembayaran yang didukung oleh QRIS (Saputri, 2020)

2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.3.1 Pengertian UMKM

Menurut Sumitro, (2004), usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi dari 50 orang. Usaha skala mikro merupakan sebagian besar dari bentuk usaha mikro dan usaha kecil misalnya pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha *souvenir*, dan sejenisnya

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung

maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya. Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap (Tambunan, 2009).

2.3.2 Kriteria UMKM

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan (Anoraga, 2010). Dengan kriteria sebagai berikut:

- A. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- B. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- C. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

2.3.3 Karakteristik UMKM

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut. Dalam Anoraga (2010) diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah admistrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di *Up To Date* sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
2. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
3. Modal terbatas
4. Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.

5. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
6. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
7. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas (Anoraga, 2010).

2.3.4 Klasifikasi UMKM

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok (Semarangkota, 2023). Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):

1. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

2.3.5 Kelebihan dan Kelemahan UMKM

UMKM mempunyai segenap kemampuan tersembunyi yang melambungkan harapan yang jadi basis peningkatan pada waktu kedepan (Anoraga, 2010), yaitu:

1. Menyediakan lapangan pekerjaan posisi industri kecil pada pemasukan tenaga kerja harus diapresiasi, diperhitungkan sanggup memasukkan hingga 50% sumber daya manusia yang bersedia.
2. Kehadirannya pengusaha muda usaha kecil dan menengah hingga kini benar dapat membantu meningkatnya usaha baru.
3. Mempunyai bagian bisnis pasar yang khusus melakukan administrasi sederhana dan elastis pada pertukaran pasar). Menggunakan sumber daya alamiah lingkungan, bisnis kecil sebagian besar menggunakan sampah hingga dari bisnis besar atau bisnis yang lainnya.
4. Mempunyai peluang untuk meningkat. Bagaimana cara pembinaan yang dilakukan memperlihatkan hasil yang melukiskan bahwa bisnis kecil sanggup untuk ditingkatkan lebih jauh dan sanggup untuk meningkatkan bidang lain yang terpaut.

Kelemahan yang banyak juga menjadikan salah satu penyebab penghalang dan persoalan permasalahan dari Usaha Mikro terjadi karna 2 faktor (Adawiyah, 2013), di antaranya:

1. Faktor Internal, adalah permasalahan sederhana dari UMKM yaitu:
 - a) Sangat kurangnya keahlian dari SDM itu sendiri
 - b) Masalah pemasaran produk setengah dari pengusaha bisnis Kecil lebih mengutamakan pada bagian produksi sedangkan fungsional pemasaran tidak sanggup dalam mengakseskannya, utamanya informasi pasar dan jaringan pasar, hingga setengahnya cuman berguna menjadi pekerja saja.
 - c) Keseringan pemakai yang lebih percaya hanya pada bisnis besar tidak yakin kualitas produk bisnis Kecil.
 - d) Masalah pendanaan kebanyakan bisnis Kecil menggunakan uangnya sendiri dalam angka yang sangat minim.
2. Faktor eksternal, yaitu permasalahan yang nampak dari bagian pengembang dan Pembimbing UMKM. Contohnya jalan keluar yang diberitahukan kurang sesuai target tidak adanya pengawasan dan program yang saling bertumpuk.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh beberapa orang yang juga meneliti bagaimana problematika penerapan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Oleh karena itu, disini peneliti akan mereview ulang apa saja yang menjadi persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian orang lain. Untuk itu perlu dibuktikan dengan

beberapa kajian sebelumnya, untuk menghindari persamaan dengan penelitian yang pernah dilakukan, maka perlu peneliti paparkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti & Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Riza Amalia Rifani (2023) Penerapan Sistem Pembayaran QRIS pada Sektor UMKM di Kota Parepare	Penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan informan sebanyak 5 orang, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.	Kesimpulan dari penelitian ini adalah UMKM di Kota Parepare sudah mengenal QRIS sebagai sistem pembayaran digital yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kehadiran QRIS sebagai pilihan pembayaran nontunai memungkinkan merchant menerima pembayaran dari pelanggan dan pembelinya dengan mudah, nyaman Cepat dan aman, hambatan baik pelaku UMKM maupun pelanggan/pembeli yang menggunakan QRIS mengalami jaringan internet yang tidak stabil saat melakukan transaksi pembayaran dan adanya biaya diskon <i>Merchant</i> sebesar 0,7% dan biaya administrasi bank untuk penggunaan QRIS, sehingga mempengaruhi pendapatan para pelaku UMKM di kota Parepare.
2.	Meida Kusumah Mardani (2023) Optimalisasi Penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kecamatan Majenang	Penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan informan sebanyak 21 orang, observasi dan dokumentasi.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan QRIS pada UKM secara umum sudah sesuai dengan sosialisasi, namun adopsi QRIS dalam penerapan sehari-hari yang terjadi di kalangan pengusaha atau konsumen masih jarang. (2) Hambatan penerapan sistem QRIS pada UKM Masih sedikit konsumen yang menggunakan QRIS di toko/ <i>Merchantnya</i> untuk bertransaksi. Dan satu UKM dikenakan biaya sebesar 0,7% dari nilai transaksi pembayaran UKM. (3) Dampak penjualan QRIS pasca penggunaan terhadap UMKM tidak mempengaruhi omzetnya. Namun banyak UKM yang mengalami perbedaan sebelum dan sesudah layanan QRIS sehingga memudahkan konsumen dalam berbisnis di toko/ <i>Merchantnya</i> .
3.	Aulia Salzabilla Ramadhan Rahman, Syarwani Canon, Mahdalena (2023) Optimalisasi Penerapan Sistem Pembayaran Digital Melalui QRIS Pada UMKM Kota Gorontalo	Penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan informan sebanyak 20 orang dan observasi.	Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi penerapan sistem pembayaran digital pada UMKM sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, minat penggunaan, dan aktual penggunaan sistem pembayaran QRIS bagi UMKM. Lebih lanjut, target yang

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti & Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>ditetapkan ditetapkan Bank Indonesia yaitu 76.000 UMKM telah tercapai sebesar 55% yakni 41.800 berkat sosialisasi yang diberikan Bank sehingga turut berkontribusi dalam optimalisasi QRIS bagi UMKM. Namun masih terdapat kendala yang harus diminimalisir, seperti: Permasalahan pada penyedia sistem pembayaran atau PJSP, dan kurangnya pengetahuan tentang QRIS mempengaruhi penggunaan QRIS yang banyak digunakan oleh kalangan remaja dan pelajar. sedikit orang tua yang paham terkait penggunaan QRIS yang berasal dari orang kantoran atau karyawan.</p>
4.	<p>Putri Surya Sartika (2022)</p> <p>Implementasi Aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Aceh (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Daud Beureueh 1)</p>	<p>Penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan informan sebanyak 5 orang dan dokumentasi.</p>	<p>Hasil penelitian ini ditemukan bahwa secara umum prosedur implementasi QRIS di BSI terbagi menjadi dua tahap, yaitu: (1) Tahap pembuatan QRIS yang meliputi pengajuan pembukaan rekening/tabungan, registrasi mobile banking, pengajuan permohonan mencetak barcode, analisa usaha, dan barcode dicetak, dan (2) Tahap penggunaan QRIS yang meliputi pembayaran jenis konsumtif dan pembayaran jenis amal ibadah. Hambatan yang dihadapi oleh BSI yaitu tingkat literasi keuangan digital masyarakat Aceh masih rendah, jaringan internet, masih banyak nasabah yang melakukan transaksi tunai, pengenaan biaya 0,7% dari nilai transaksi pembayaran UMKM.</p>
5.	<p>Ni Wayan Dian Yusmara Yanti (2022)</p> <p>Analisis Penerapan Sistem Pembayaran QRIS (Quick Response Indonesian Standard) Pada UMKM di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung</p>	<p>Penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) QRIS untuk UMKM di Kabupaten Nusa Penida berperan sebagai metode pembayaran non tunai yang sederhana dan mudah bagi penggunanya, serta merupakan bentuk implementasi untuk mendukung program pemerintah dan mempermudah membuat laporan usaha efektif dan transparansi keuangan. (2) Kurangnya jaringan internet, biaya transaksi dan sedikitnya jumlah pengguna QRIS menjadi kendala penerapan QRIS dari sudut pandang UMKM. (3) Penggunaan QRIS memberikan dampak positif dan efektif dalam menghadirkan kemudahan dan manfaat dalam bertransaksi dan pelaporan keuangan bagi UMKM di Kabupaten Nusa Penida.</p>

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti & Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
6.	Muliana Ikhsan (2022) Implementasi Sistem Pembayaran (QRIS) Quick Response Code Indonesian Standart Bagi Perkembangan UMKM Kuliner Kecamatan Medan Area	Penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan informan sebanyak 3 orang, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 3 UMKM. Penerapan QRIS dapat memudahkan usaha para pedagang dan menjaga keamanan pendapatan. Selain itu, penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran didukung dengan perkembangan teknologi saat ini yang tentunya memudahkan dalam segala hal, termasuk membayar dengan smartphone dengan cara scan kode QR yang telah disediakan, sedangkan faktor penghambatnya adalah masyarakat masih nyaman untuk membayar barang yang dibeli secara tunai.
7.	Ayunda Azhari (2021) Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS) Pada Sektor UMKM di Kota Pematangsiantar	Penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan informan sebanyak 5 orang, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Merchant</i> (UMKM) di kota Pematangsiantar sebagian besar mengetahui QRIS sebagai alat pembayaran digital yang dikeluarkan Bank Indonesia; QRIS menawarkan kelebihan dibandingkan sistem pembayaran digital lainnya. Kedua, kemudahan pembayaran QRIS memungkinkan <i>Merchant</i> (UMKM) untuk melakukan pembayaran dengan lebih praktis, cepat, dan aman, sehingga membuat masyarakat lebih suka berbelanja, yang secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan mereka. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Pematangsiantar juga menghadapi kendala karena ada biaya <i>Merchant</i> discount rate (Mdr) sebesar 0,07% yang dikenakan kepada para pedagang.
8.	Ni Made Cahyani Wulandari (2021) Analisis Penerapan Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Terhadap UMKM Kota Singaraja Pada Masa Pandemi Covid-1	Penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi	hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kiprah QRIS menjadi fasilitas pembayaran berdampak positif terhadap pelaku UMKM Kota Singaraja di masa pandemi covid-19. (2) hambatan pada penerapan QRIS ditinjau dari perspektif UMKM terletak pada jaringan internet yang kurang memadai tetapi tak signifikan. (3) penilaian efektivitas menggunakan QRIS berdampak positif dalam menyampaikan kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam pelaporan penjualan

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian ini antara lain:

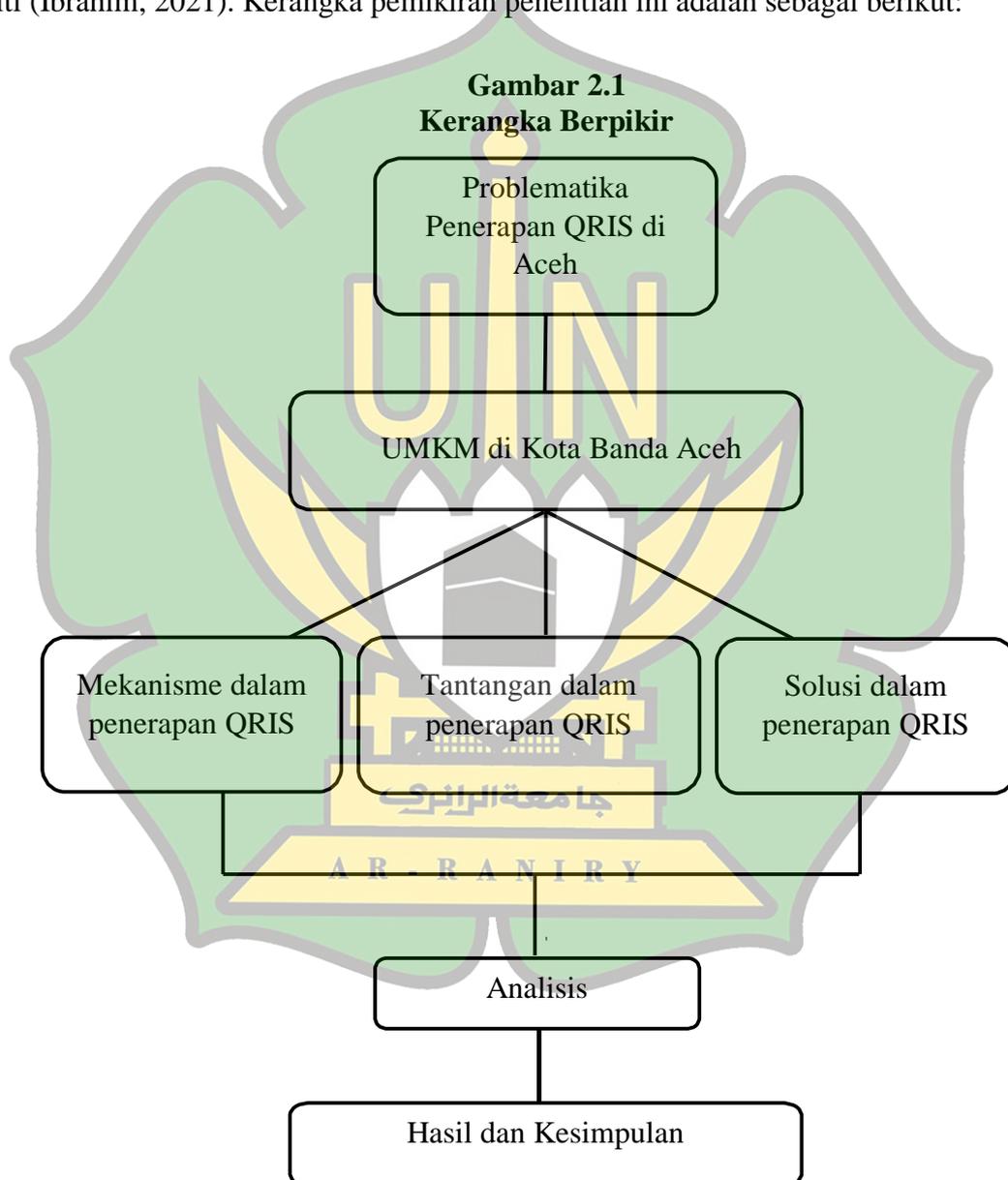
- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Riza Amalia Rifani (2023) dengan judul “Penerapan Sistem Pembayaran QRIS pada Sektor UMKM di Kota Parepare.” Persamaan penelitian ini dan penelitian Riza Amalia (2023) secara serupa membahas penerapan Sistem Pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Namun, perbedaan muncul dalam konteks lokasi penelitian, dengan penelitian ini terfokus pada UMKM di Kota Banda Aceh, sementara penelitian Riza Amalia Rifani memusatkan perhatian pada UMKM di Kota Parepare.
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Meida Kusumah Mardani (2023) dengan judul “Optimalisasi Penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kecamatan Majenang.” Persamaannya adalah sama-sama fokus penerapan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), serta keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Meskipun sama-sama mengeksplorasi optimalkan penerapan QRIS, perbedaan utama terletak pada lokasi penelitian, dengan terfokus pada Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kota Banda Aceh, sedangkan penelitian Meida Kusumah Mardani menitikberatkan pada Kecamatan Majenang.
- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Salzabilla Ramadhan Rahman, Syarwani Canon, Mahdalena (2023) dengan judul “Optimalisasi Penerapan Sistem Pembayaran Digital Melalui QRIS Pada UMKM Kota Gorontalo.” Memiliki kesamaan dalam mengusulkan optimalisasi penerapan Sistem Pembayaran Digital melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kedua penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk memahami secara mendalam dampak serta hambatan penerapan QRIS pada UMKM. Meskipun memiliki fokus yang serupa, perbedaan utamanya terletak pada konteks lokasi penelitian, dengan penelitian Anda tertuju pada UMKM di Kota Banda Aceh, sementara penelitian mereka menitikberatkan pada UMKM di Kota Gorontalo.
- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Putri Surya Sartika (2022) dengan judul “Implementasi Aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Aceh (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Daud Beureueh 1).” Persamaannya adalah memiliki fokus serupa pada implementasi Aplikasi QRIS. Keduanya menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif untuk menyelidiki dampak serta permasalahan implementasi QRIS. Sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitian, yaitu nasabah Bank Syariah Indonesia di Aceh dan kantor cabang spesifik pada penelitian Putri Surya Sartika sedangkan penelitian ini objeknya adalah studi kasus di UMKM kota Banda Aceh.
- 5) Penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Dian Yusmara Yanti (2022) dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Pembayaran QRIS (*Quick Response Indonesian Standard*) Pada UMKM di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung.”

Memiliki kesamaan dalam menganalisis penerapan Sistem Pembayaran QRIS pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keduanya mengadopsi metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif untuk memahami dampak dan kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam menggunakan QRIS. Meskipun sejalan dalam tujuan menganalisis penerapan QRIS pada UMKM, perbedaan utamanya terletak pada lokasi penelitian, yaitu di Kota Banda Aceh untuk penelitian ini dan di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung untuk penelitian Ni Wayan Dian Yusmara Yanti.

- 6) Penelitian yang dilakukan oleh Ayunda Azhari (2021) dengan judul “Implementasi Sistem Pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Pada Sektor UMKM di Kota Pematangsiantar.” Penelitian ini dan penelitian sebelumnya memiliki persamaan dalam menganalisis implementasi Sistem QRIS pada sektor UMKM dan kedua penelitian ini mengusung metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, bertujuan untuk memahami dampak serta tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam mengadopsi QRIS. Perbedaan utamanya terletak pada konteks lokasi penelitian, dengan penelitian ini terfokus pada Kota Banda Aceh, sementara penelitian Ayunda Azhari ditujukan kepada UMKM di Kota Pematangsiantar.
- 7) Penelitian yang dilakukan oleh Muliana Ikhsan (2022) dengan judul “Implementasi Sistem Pembayaran (QRIS) *Quick Response Code Indonesian Standard* Bagi Perkembangan UMKM Kuliner Kecamatan Medan Area.” Penelitian ini dan penelitian sebelumnya memiliki fokus yang serupa, yakni menganalisis implementasi Sistem Pembayaran QRIS bagi perkembangan UMKM. Keduanya mengadopsi metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, bertujuan untuk memahami dampak dan kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam memanfaatkan QRIS sebagai sistem pembayaran. Perbedaan utamanya terletak pada lokasi penelitian, di Kota Banda Aceh untuk penelitian Anda dan di Kecamatan Medan Area untuk penelitian Muliana Ikhsan.
- 8) Penelitian yang dilakukan oleh Muliana Ikhsan (2022) Implementasi Sistem Pembayaran (QRIS) *Quick Response Code Indonesian Standard* Bagi Perkembangan Umkm Kuliner Kecamatan Medan Area.” Penelitian ini, serupa dengan studi yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya yang memfokuskan analisis pada penerapan Sistem Pembayaran QRIS terhadap Pelaku UMKM. Kedua penelitian ini mengusung pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, dengan tujuan untuk menyelidiki dampak dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam menerapkan QRIS sebagai sistem pembayaran. Meskipun fokusnya serupa, perbedaan terletak pada konteks pandemi Covid-19 yang menjadi latar belakang studi sebelumnya serta lokasi penelitian yang berbeda.

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah model konseptual yang berkaitan dengan cara seorang peneliti dalam menyusun teori dan menghubungkannya secara logis beberapa faktor penting untuk masalah. Kerangka berpikir membahas saling ketergantungan hubungan antar variabel yang dianggap perlu untuk melengkapi paradigma situasi dan kondisi yang sedang diteliti (Ibrahim, 2021). Kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:



- Berdasarkan Gambar 2.1, adapun maksud dalam penelitian ini adalah ingin mengkaji bagaimana problematika atau kesenjangan dalam penerapan QRIS di Aceh dengan melakukan studi kasus pada UMKM di kota Banda Aceh yang telah menggunakan QRIS sebagai alat transaksi pembayarannya.

- Oleh karena itu, dilakukan penelitian dan peneliti mengharapkan akan menemukan permasalahan dalam penelitian ini yakni hambatan serta solusi dalam penerapan QRIS oleh UMKM di kota Banda Aceh. Oleh karena itu, peneliti perlu mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang ada.
- Pada tahap selanjutnya, peneliti akan melakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis data dalam penelitian kualitatif untuk menjawab rumusan masalah sehingga bisa diperoleh hasil penelitian dan kesimpulan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Strauss & Corbin (1991) dalam Shodiq & Muttaqien (2013) penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang tidak berfokus pada pengukuran dan pengujian hipotesis, tetapi berfokus pada pemahaman mendalam dan kontekstual atas fenomena yang ingin diteliti. Penelitian kualitatif juga menggunakan metode analisis induktif, di mana data yang terkumpul digunakan untuk mengembangkan teori baru yang didasarkan pada data itu sendiri. Metode ini digunakan untuk memahami seberapa jauh problematika penerapan QRIS bagi UMKM di Aceh.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, Penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk pendekatan kualitatif yang difokuskan pada penjelasan mendetail tentang objek penelitian. Jenis penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menerangkan keadaan atau fenomena yang diamati, menjelaskan karakteristik atau sifat-sifatnya, serta menggambarkan pola-pola dan hubungan antar variabel yang terdapat dalam fenomena tersebut. Perbedaan antara penelitian deskriptif dengan eksperimen terletak pada fakta bahwa penelitian deskriptif tidak melakukan perubahan terhadap variabel-variabel bebasnya. Baik peristiwa dan fakta yang masih terjadi sampai sekarang maupun yang terjadi pada waktu yang lalu akan dideskripsikan secara rinci dalam penelitian deskriptif (Ibrahim, 2021). Pendekatan ini juga dimaksudkan untuk mendapat gambaran atau keterangan mengenai bagaimana problematika penerapan QRIS bagi UMKM di Aceh.

Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah *Field Research* atau penelitian Lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau tempat yang sebenarnya, di mana para peneliti mengumpulkan data langsung dari sumbernya (Fathoni, 2006). Dengan jenis penelitian ini, peneliti akan terjun langsung ke para pelaku UMKM untuk menggali informasi mengenai bagaimana pengimplementasian QRIS oleh para pelaku UMKM serta permasalahan yang dihadapi.

3.2 Objek dan Subyek penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Sugiyono (2015) mendefinisikan objek penelitian merupakan suatu hal, fenomena, atau masalah yang menjadi fokus penelitian yang dilakukan yang dapat berupa individu, kelompok, lembaga, organisasi, kejadian, atau dokumen. Dalam penelitian, objek penelitian menjadi hal yang penting untuk dikaji dan dianalisis, karena melalui objek penelitian tersebut, peneliti dapat memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

Dalam penelitian ini, objek penelitian yang menjadi fokus utama adalah implementasi QRIS pada UMKM di Kota Banda Aceh. Penelitian akan memfokuskan pada kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam menerapkan QRIS, seperti perbedaan teknologi, infrastruktur, dan kesiapan pelaku usaha dalam mengadopsi QRIS. Selain itu, penelitian ini juga akan memperhatikan masalah yang muncul terkait dengan penerapan QRIS di Banda Aceh, seperti masalah regulasi dan kebijakan serta masalah sosial dan budaya yang mempengaruhi adopsi teknologi di masyarakat Banda Aceh.

3.2.2 Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah individu, kelompok, atau subyek yang menjadi fokus penelitian yang dilakukan. Menurut Moleong (2012), subyek penelitian adalah orang, kelompok, atau fenomena yang menjadi subyek atau fokus penelitian. Subyek penelitian manusia sendiri dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti subyek penelitian individu, kelompok, atau masyarakat. Pemilihan subyek penelitian yang tepat sangat penting untuk menjamin keberhasilan penelitian dan keabsahan hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, peneliti perlu mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan etika penelitian dalam memilih subyek penelitian yang sesuai.

Adapun dalam penelitian ini, subyek penelitian yang menjadi fokus utama adalah pelaku UMKM di Kota Banda Aceh yang menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran elektronik. Penelitian akan memfokuskan pada pengalaman UMKM dalam menerapkan QRIS, seperti keuntungan dan kerugian yang diperoleh, hambatan yang dihadapi dalam penerapan QRIS, dan faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi QRIS oleh UMKM. Selain itu, penelitian ini juga akan memperhatikan peran stakeholder lain yang terlibat dalam penerapan QRIS di Aceh, seperti regulator QRIS atau pihak perbankan serta pakar atau pihak akademisi. Jumlah informan yang diharapkan dalam penelitian ini sebanyak 10 pelaku UMKM di Banda Aceh. Adapun penentuan

Subyek Penelitiannya menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Untuk lebih jelas terkait subyek penelitian dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3.1
Subyek Penelitian

Informan	Keterangan	Tujuan
UMKM (13 Sampel)	<ol style="list-style-type: none"> 1) UMKM yang sudah berdiri minimal 1 (satu) tahun 2) UMKM yang sudah menggunakan QRIS 1 (satu) bulan penggunaan. 3) UMKM yang sudah menggunakan QRIS 1 (satu) tahun penggunaan. 	Mengetahui bagaimana tantangan dalam penggunaan QRIS UMKM di Banda Aceh.
Pihak Perbankan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bank Indonesia Provinsi Aceh 	Memberikan pengetahuan yang mendalam terkait tantangan penerapan QRIS di Aceh dari perspektif perbankan serta solusi dari pihak perbankan untuk mengatasi problematika yang terkait dengan penerapan QRIS oleh UMKM di Aceh.
Pakar Ekonomi atau Pihak Akademisi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pak Dr. Azharsyah Ibrahim, SE.Ak., M.S.OM 2) Pak Riza Aulia, S.E.I., M.Sc. 	Memberikan pandangan/pendapat atas problematika yang terjadi dalam serta memberikan solusi untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam penggunaan QRIS di Aceh

Tabel 3.1 Lanjutan

Informan	Keterangan	Tujuan
Pakar Dinas Koperasi dan UKM Aceh	1) Pak Saiful Bahri, SE, MM	Memberikan pendapat atas problematika yang terjadi dalam serta memberikan solusi untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam penggunaan QRIS di Aceh

Sumber : Data Diolah, 2023

3.3 Sumber data

Menurut Ibrahim (2021), data merupakan informasi yang diperoleh secara empiris oleh peneliti untuk tujuan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data penelitian dapat bervariasi dan diperoleh melalui penggunaan teknik-teknik yang berbeda selama proses penelitian berlangsung. Adapun sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer adalah Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumbernya. Jenis data ini sering disebut sebagai data asli atau data baru yang memiliki kebaruan dan akurasi yang terjamin. Agar memperoleh data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung dari sumbernya. Contoh sumber data primer antara lain wawancara, observasi, kuesioner, dan eksperimen. Data yang diperoleh dalam penelitian melalui observasi atau pengamatan di tempat usaha UMKM yang menggunakan QRIS dan melakukan wawancara atau *interview* secara langsung dengan para pelaku UMKM, pakar ekonomi, pihak akademisi serta pihak perbankan yang turut memberikan pendapat mereka mengenai penelitian ini.
2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, sehingga peneliti bertindak sebagai tangan kedua. Jenis data ini diperoleh oleh peneliti melalui data yang sudah ada yang dikumpulkan oleh pihak lain melalui berbagai metode. Data tersebut diperoleh dari sumber-sumber yang relevan sebagai sumber yang mendukung riset atau penelitian seperti seperti buku, jurnal, laporan, dan sumber-sumber elektronik seperti internet serta foto-foto. Data sekunder yang dimaksud seperti Dokumentasi-dokumentasi yang disediakan oleh peneliti dan data yang diperoleh berupa referensi dan informasi lainnya yang berkaitan dengan

pembahasan dalam penelitian ini seperti laporan perkembangan UMKM serta laporan pengguna QRIS di Aceh dan lain-lain.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses mencatat, peristiwa, informasi, karakteristik atau hal-hal lainnya yang terkait sebagian maupun seluruh elemen populasi yang bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, seorang peneliti perlu mempertimbangkan karakteristik objek penelitian, tujuan penelitian, dan sumber daya yang tersedia dalam memilih teknik pengumpulan data yang tepat. Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini (Ibrahim 2021), di antaranya:

3.4.1 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pewawancara menanyakan pertanyaan secara langsung kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban yang diberikan. Dalam melakukan wawancara pada suatu penelitian, disarankan untuk membuat panduan wawancara agar peneliti dapat lebih fokus pada hal-hal yang ingin diketahui. Panduan ini berguna untuk memandu pewawancara dalam menanyakan pertanyaan yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.

Wawancara dapat bersifat terstruktur, yaitu peneliti sudah menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, atau tidak terstruktur, yaitu peneliti hanya memiliki kerangka pertanyaan namun tidak menentukan pertanyaan yang pasti akan ditanyakan. Pemilihan jenis wawancara yang tepat perlu disesuaikan dengan tujuan penelitian dan karakteristik responden atau informan yang akan diwawancarai. Dalam penelitian ini, peneliti mencatat atau merekam semua jawaban dari informan secara utuh. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, di mana peneliti menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara dengan informan. Wawancara yang akan peneliti lakukan adalah dengan tanya-jawab kepada informan secara langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun wawancara atau *interview* yang akan dilakukan secara langsung dengan para pelaku UMKM, pakar ekonomi, pihak akademisi serta pihak perbankan. Adapun Informan dalam wawancara penelitian ini antara lain:

Tabel 3.2
Informan Wawancara

No	Nama/ Nama Usaha	Keterangan	Tujuan	Kode
1.	Irwan	Pihak Bank Indonesia Provinsi Aceh	Memberikan pengetahuan yang mendalam terkait tantangan penerapan QRIS di Aceh dari perspektif perbankan serta solusi dari pihak perbankan untuk mengatasi problematika yang terkait dengan penerapan QRIS oleh UMKM di Aceh.	I-01
2.	Riza Aulia, S.E.I., M.Sc	Pihak Pakar Ekonomi Syariah	Memberikan pandangan/pendapat atas problematika yang terjadi dalam serta memberikan solusi untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam penggunaan QRIS di Aceh	I-02
3.	Dr. Azharsyah Ibrahim, SE.Ak, M.S.O.M	Pihak Pakar Ekonomi Syariah	Memberikan pandangan/pendapat atas problematika yang terjadi dalam serta memberikan solusi untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam penggunaan QRIS di Aceh	I-03

Tabel 3.2 Lanjutan

No	Nama/ Nama Usaha	Keterangan	Tujuan	Kode
4.	Saiful Bahri, SE, MM	Pihak Dinas Koperasi dan UKM Aceh	Memberikan pendapat atas problematika yang terjadi dalam serta memberikan solusi untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam penggunaan QRIS di Aceh	I-04
5.	Warung kopi SMEA Premium Kupi	Pihak UMKM	Mengetahui bagaimana tantangan dalam penggunaan QRIS UMKM di Banda Aceh.	I-05
6.	King Fried Chicken	Pihak UMKM	Mengetahui bagaimana tantangan dalam penggunaan QRIS UMKM di Banda Aceh.	I-06
7.	Warkop Better Life	Pihak UMKM	Mengetahui bagaimana tantangan dalam penggunaan QRIS UMKM di Banda Aceh.	I-07
8.	Warkop Lapan Limong	Pihak UMKM	Mengetahui bagaimana tantangan dalam penggunaan QRIS UMKM di Banda Aceh.	I-08

Tabel 3.2 Lanjutan

No	Nama/ Nama Usaha	Keterangan	Tujuan	Kode
9.	Warkop Costa	Pihak UMKM	Mengetahui bagaimana tantangan dalam penggunaan QRIS UMKM di Banda Aceh.	I-09
10.	Kios Abang Adek Cell	Pihak UMKM	Mengetahui bagaimana tantangan dalam penggunaan QRIS UMKM di Banda Aceh.	I-10
11.	Warung Makan Mie Ceker	Pihak UMKM	Mengetahui bagaimana tantangan dalam penggunaan QRIS UMKM di Banda Aceh.	I-11
12.	Kios Asia Cell,	Pihak UMKM	Mengetahui bagaimana tantangan dalam penggunaan QRIS UMKM di Banda Aceh.	I-12
13.	Warkop Pak Haji	Pihak UMKM	Mengetahui bagaimana tantangan dalam penggunaan QRIS UMKM di Banda Aceh.	I-13
14.	Warkop Tanggul Kupi	Pihak UMKM	Mengetahui bagaimana tantangan dalam penggunaan QRIS UMKM di Banda Aceh.	I-14

Tabel 3.2 Lanjutan

No	Nama/ Nama Usaha	Keterangan	Tujuan	Kode
15.	Rumah Makan Minang Baru	Pihak UMKM	Mengetahui bagaimana tantangan dalam penggunaan QRIS UMKM di Banda Aceh.	I-15
16.	Wedana Swalayan	Pihak UMKM	Mengetahui bagaimana tantangan dalam penggunaan QRIS UMKM di Banda Aceh.	I-16
17.	Dasyafa Food	Pihak UMKM	Mengetahui bagaimana tantangan dalam penggunaan QRIS UMKM di Banda Aceh.	I-17

Sumber: Data Wawancara (2023)

3.4.2 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pemilihan, perubahan, pencatatan, dan pengkodean perilaku dan suasana yang berhubungan dengan organisme yang diamati dengan tujuan empiris. Proses pemilihan dilakukan oleh pengamat untuk memfokuskan pengamatan pada hal-hal yang ingin diketahui. Pengamatan juga bisa mengubah perilaku tanpa mengganggu kewajarannya. Hasil pengamatan dicatat dengan menggunakan berbagai metode seperti catatan lapangan dan sistem kategori, kemudian disederhanakan melalui proses reduksi data. Pengamatan dilakukan pada berbagai perilaku dan suasana dalam situasi alamiah, meskipun tidak selalu tanpa manipulasi secara eksperimental.

Adapun jenis teknik observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipatif (*Non-participant observation*) ialah peneliti tidak terlibat langsung secara aktif pada objek yang teliti dengan kata lain, *observer* tidak berperan serta ikut ambil bagian kehidupan yang menjadi objek. Adapun observasi yang dilakukan melalui pengamatan di tempat usaha UMKM yang menggunakan QRIS.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik dalam pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis misalnya arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sedangkan dokumen terekam misalnya film, kaset rekaman, foto dan sebagainya. Sehingga dokumen ini menjadi pelengkap dalam instrumen penelitian kualitatif yang menjadi pendukung peneliti dalam memperoleh data yang lebih akurat. Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa foto-foto, laporan-laporan pengguna QRIS serta perkembangan UMKM dan atau buku, jurnal, atau sumber dari internet yang dapat dijadikan sebagai referensi.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk memproses, mengorganisir, menganalisis, dan memahami data. Analisis data bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang sudah dirumuskan (Hardani et al., 2020). Model Analisis data yang digunakan peneliti adalah model analisis data Interaktif. Menurut Miles & Huberman (1992) dalam mengemukakan bahwa model ini memiliki tiga komponen utama yang harus ada dalam analisis data kualitatif guna menentukan kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian (Hardani et al., 2020), di antaranya:

3.5.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya langkah peneliti untuk melakukan kegiatan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstrakan dari semua jenis informasi yang mendukung data-data penelitian yang telah diperoleh dan melakukan pencatatan selama proses pengumpulan data dimana proses ini dilakukan dengan cara terus-menerus selama penelitian berlangsung.

Dalam hal ini, peneliti dapat melakukan koding, mencari dan memasukkan tema, mengkategorisasi, dan mencatat memo berupa tulisan ringkas mengenai isi catatan data yang diperoleh di lapangan. Reduksi data bertujuan untuk membuat narasi sajian data mudah dipahami dengan baik dan mengarah pada kesimpulan akhir yang kredibel atau dapat dipertanggungjawabkan.

3.5.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu perancangan organisasi informasi dalam bentuk deskripsi dan narasi yang lengkap, yang disusun berdasarkan pokok temuan yang terdapat dalam reduksi data dan disajikan menggunakan bahasa yang logis dan sistematis, sehingga mudah dipahami. Penyajian data akan disampaikan dalam bentuk narasi disertai dengan matriks,

gambar, grafik, jaringan, bagan, tabel, skema, dan sebagainya. Tujuan dalam penyajian data adalah untuk menjawab permasalahan penelitian melalui proses analisis data. Melalui pemahaman ini peneliti dapat melakukan analisis data untuk merumuskan penemuan-penemuan dalam penelitian dan mengemukakan akhir simpulan dalam penelitian.

3.5.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis juga interpretasi data. Peneliti harus menemukan makna berdasarkan data yang digali secara teliti, lengkap, mendalam dengan kata lain bagaimana cara peneliti menarik kesimpulan untuk memperoleh makna peristiwa yang diteliti dengan memikirkannya dengan secara hati-hati. Dalam penelitian kualitatif, simpulan perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan menelusuri ulang semua langkah penelitian yang telah dilakukan, meliputi pemeriksaan data yang terkumpul seperti wawancara, dokumentasi, dan studi literatur, reduksi yang telah dibuat, dan kesimpulan yang telah dirumuskan yang nantinya penarikan kesimpulan akhir dibuat secara singkat, jelas, dan lugas agar mudah dipahami.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi. Menurut Moleong (2012) triangulasi adalah memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau menjadi pembanding terhadap data yang diperoleh dari penggunaan teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan teknik ini untuk meningkatkan jaminan data yang telah diperoleh serta mencegah bahaya subyektivitas. Menurut Denzin (1978) dalam Moleong (2012) ada empat tipe triangulasi sebagai teknik keabsahan data seperti triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi peneliti, dan triangulasi teori. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan 1 (satu) tipe triangulasi, yakni Triangulasi sumber data.

3.6.1 Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi dengan menggunakan berbagai sumber data yang diambil lebih dari satu subyek yang dianggap memiliki sudut pandang berbeda dan akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda. Dalam triangulasi ini peneliti akan membandingkan hasil wawancara informan-informan yang menurut peneliti memiliki cara pandang atau pengetahuan yang berbeda serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen atau literatur yang berkaitan. Hal ini akan muncul berbagai pengetahuan untuk memperoleh kebenaran yang handal (Moleong, 2012).

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Banda Aceh adalah ibu kota dari provinsi Aceh yang terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera. Kota ini merupakan salah satu kota Islam tertua di Asia Tenggara, disebut sebagai Serambi Mekkah. Sebagai pusat Kerajaan Aceh Darussalam, kota ini memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Pada masa kejayaannya, terutama di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda (1607-1636), Banda Aceh menjadi pusat regional, pendidikan Islam, dan perdagangan internasional. Kota ini menjadi tempat persinggahan pedagang dari Cina, Eropa, India, dan Arab, memperkenalkan budaya dan agama ke daerah Aceh dengan sejarah yang kaya dan beragam, Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya di Provinsi Aceh (Bandaacehkota, 2023).

Secara geografis, kota Banda Aceh terletak di koordinat 5°33' Lintang Utara dan 95°19' Bujur Timur. Kota ini berada di tepi Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di sebelah barat. Banda Aceh juga berada di sebelah utara dari Kabupaten Aceh Besar dan sebelah timur dari Kabupaten Aceh Jaya. Saat ini, Kota Banda Aceh, jumlah penduduk kota banda aceh pada tahun Juni 2023 sejumlah 257,635 jiwa. Wilayah Kota Banda Aceh memiliki luas sekitar 61,36 km² dan terdiri dari 9 kecamatan (Perkim.id, 2020), diantaranya:

1. Kecamatan Baiturrahman
2. Kecamatan Lueng Bata
3. Kecamatan Kuta Alam
4. Kecamatan Meuraxa
5. Kecamatan Syiah Kuala
6. Kecamatan Ulee Kareng
7. Kecamatan Jaya Baru
8. Kecamatan Banda Raya
9. Kecamatan Kuta Raja

Perekonomian di Banda Aceh didukung oleh berbagai sektor, termasuk perdagangan, pariwisata, pertanian, dan industri. Sebagai kota yang terletak di pantai barat laut Pulau Sumatera, Banda Aceh memiliki pelabuhan yang penting untuk perdagangan internasional dan domestik (Acehprov, 2019). Selain itu, sektor pariwisata juga berperan penting dalam perekonomiannya, dengan daya tarik seperti Masjid Raya Baiturrahman dan Pantai Lhok Nga.

Banda Aceh juga memiliki sektor jasa yang berkembang, termasuk layanan keuangan syariah dan industri kecil dan menengah yang juga turut berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di kota (Dispar, 2021).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di Banda Aceh. Banyak individu di Kota Banda Aceh menggantungkan kehidupan mereka pada berbagai UMKM, yang mencakup produksi barang, kegiatan penjualan, dan penyediaan berbagai jenis jasa (Bandaacehkota, 2021). Kota ini dapat diketahui memiliki sejumlah besar UMKM, seperti yang direkap oleh Dinas Koperasi, dan UKM provinsi Aceh, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.1

Data Rekap UMKM Kabupaten/Kota 2022-2023			
No.	Kab/Kota	Jumlah	
1	Banda Aceh	600	1097
2	Aceh Besar	620	1069
3	Pidie	616	744
4	Pidie Jaya	600	739
5	Bireuen	600	965
6	Aceh Utara	609	1012
7	Lhokseumawe	618	968
8	Aceh Timur	600	696
9	Langsa	640	741
10	Aceh Tamiang	689	883
11	Bener Meriah	561	662
12	Aceh Tengah	380	380
13	Gayo Lues	530	901
14	Aceh Tenggara	399	646
15	Aceh Selatan	508	810
16	Aceh Jaya	660	710

Tabel 4.1 Lanjutan

Data Rekap UMKM Kabupaten/Kota 2022-2023			
17	Aceh Barat	611	1000
18	Nagan Raya	604	840
19	Aceh Barat Daya	616	671
20	Sabang	615	959
21	Singkil	652	1100
22	Subulussalam	384	478
23	Simelulue	598	690
Total		13,310	18,761

Sumber: Dinas Koperasi dan UMK Provinsi Aceh (2023)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui, data jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Aceh pada tahun 2022 dan 2023. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Provinsi Aceh terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, jumlah UMKM di Provinsi Aceh mencapai 13.310 unit, dan meningkat menjadi 18.761 unit pada tahun 2023. Banda Aceh merupakan salah satu kota dengan jumlah UMKM terbanyak di Provinsi Aceh, dengan jumlah mencapai 1.097 unit pada tahun 2023. Jumlah UMKM di Banda Aceh meningkat mencapai 178.17% dari tahun 2022, yang berjumlah 600 unit.

Peningkatan UMKM di Banda Aceh tidak terlepas dari dukungan pemerintah. Pemerintah Kota Banda Aceh telah memberikan berbagai bantuan kepada UMKM, seperti bantuan dana, program pasar murah online, dan pendirian LKM Syariah. Bantuan tersebut telah mendorong pertumbuhan UMKM dan berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah terus dorong akses pembiayaan UMKM melalui dana KUR bunga rendah bersama Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Indonesia. Selain itu, fokus pada peningkatan literasi dan kapasitas UMKM tetap menjadi prioritas. Upaya ini diarahkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pelaku UMKM agar dapat mengelola usahanya dengan efektif (Harnita, 2023).

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh dipengaruhi oleh lokasi usaha, harga produk, ketersediaan tenaga kerja terampil, serta sertifikasi halal, terutama dalam sektor makanan dan minuman. Selain itu, faktor-faktor seperti edukasi kesehatan, kepemimpinan, fokus pada pelanggan, manajemen sumber daya manusia, dan

pengendalian proses monitoring berkualitas juga berperan dalam meningkatkan kinerja keuangan UMKM. Dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh, Pemerintah setempat telah mengimplementasikan berbagai upaya. Salah satunya adalah pemberian pelatihan dan bantuan kepada pelaku UMKM, termasuk pelatihan kewirausahaan, manajemen, dan bantuan modal usaha. Selain itu, peningkatan akses pembiayaan juga menjadi fokus, baik melalui program pemerintah maupun kerja sama dengan lembaga keuangan (Tri W, 2023).

Pentingnya peningkatan kualitas produk dan layanan yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan dukungan seperti pelatihan dan bantuan seperti sertifikasi halal. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bantuan pengembangan menjadi langkah signifikan. Peningkatan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan diharapkan dapat membantu UMKM memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Pemanfaatan teknologi dan informasi turut menjadi strategi dengan penyediaan pelatihan dan bantuan untuk pemanfaatan platform digital seperti aplikasi pembayaran non tunai QRIS dan aplikasi *e-commerce*, upaya ini dilakukan untuk mencerminkan komitmen pemerintah dan pihak terkait dalam mendukung pertumbuhan dan daya saing UMKM di Kota Banda Aceh (Bandaacehkota, 2021). Adapun daftar jumlah usaha UMKM yang di teliti diantaranya:

Tabel 4.2

Analisis Deskriptif UMKM Pengguna QRIS

UMKM	Kategori UMKM	Tahun Awal Penggunaan QRIS
Warung Kopi SMEA Premium Kupa Lhong Raya	UKE	2020
King Fried Chicken	UMI	2021
Warkop Better Life	UMI	2020
Warkop Lapan Limong	UKE	2020
Kios Abang Adek Cell	UMI	2022
Warung Makan Mie Ceker	UMI	2022
Kios Asia Cell,	UMI	2022
Warkop Pak Haji	UKE	2020
Warkop Tanggul Kupa	UKE	2020
Warkop Costa	UKE	2020
Rumah Makan Minang Baru	UMI	2020
Wedana Swalayan	UMI	2021
Dasyafa Food	UMI	2022

Sumber: Data Informan Penelitian

4.2 Mekanisme Penerapan Aplikasi QRIS bagi UMKM di Kota Banda Aceh

Kemajuan pesat di bidang teknologi informasi mendorong masyarakat untuk lebih familiar dengan transaksi keuangan digital, khususnya melalui dompet digital. Pada 17 Agustus 2019, Bank Indonesia meluncurkan standar *Quick Response* (QR) Code untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik, dompet elektronik, atau mobile banking, yang disebut QR Code Indonesian Standard (QRIS). Bank Indonesia menerapkan aturan regulasi QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*) untuk pembayaran melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG/2019 dan Perubahan PADG Nomor 23/8/PADG/2021. QRIS, yang mulai efektif berlaku secara nasional sejak 1 Januari 2020, menjadi bagian idalam mewujudkan visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025. Regulasi ini bertujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, inklusi keuangan, mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta memajukan pertumbuhan ekonomi (Bank Indonesia, 2022).

QRIS sebagai standar nasional QR Code untuk pembayaran, menjadikan setiap penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP) berbasis QR wajib menggunakan QRIS dalam setiap transaksi pembayaran. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan kerangka kerja yang terstandarisasi dan terukur, memastikan keamanan serta kenyamanan dalam transaksi digital agar implementasi QRIS, setiap transaksi dapat diawasi oleh regulator melalui satu jalur sehingga dapat memberikan kontrol yang lebih baik terhadap sistem pembayaran di Indonesia (Rachman, 2023).

Regulasi QRIS juga diarahkan untuk mengatasi potensi munculnya monopoli bisnis dengan memastikan bahwa semua penyedia jasa sistem pembayaran berbasis QR mengikuti standar yang sama. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berdaya saing, mendukung keberagaman dan inovasi di sektor pembayaran elektronik. Dalam wawancara dengan Pihak Ahli Pemasaran, Bank Indonesia Provinsi Aceh Pak Irwan dengan kode Informan I-01, dijelaskan bahwa Bank Indonesia tengah berupaya mendorong adopsi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Kota Banda Aceh dengan fokus utama pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Informan menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai manfaat QRIS bagi UMKM. Salah satu poin yang disorot adalah kemampuan QRIS dalam menyimpan riwayat transaksi, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan daya saing usaha, serta meningkatkan keamanan transaksi. Informan juga menjelaskan bahwa terdapat insentif berupa reward dan diskon yang diberikan untuk mendorong adopsi QRIS.

Selama wawancara, informan mengungkapkan bahwa upaya penerapan QRIS di Kota Banda Aceh melibatkan berbagai kegiatan, seperti sosialisasi dan edukasi kepada pelaku

UMKM. Fokus presentasi dan penjelasan kepada para pelaku UMKM mencakup pemahaman yang mendalam mengenai kelebihan QRIS, dampak positif yang dihasilkan, dan cara optimal pemanfaatannya. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi transaksi non-tunai, menyediakan kemudahan dalam proses pembayaran, serta meningkatkan kualitas dan keamanan transaksi dibandingkan dengan metode pembayaran offline atau tunai.

Dengan menyediakan satu QR code untuk menerima pembayaran dari berbagai aplikasi, QRIS membawa inovasi dan solusi yang krusial dalam mengembangkan sistem pembayaran digital bagi UMKM di Kota Banda Aceh. Dari hasil wawancara bersama informan Pak Irwan dan hasil observasi atau pengamatan dari peneliti, mekanisme penerapan Aplikasi QRIS bagi UMKM di kota Banda Aceh, dapat dilihat sebagai berikut, diantaranya:

1. Pendaftaran dan Aktivasi QRIS

UMKM yang ingin menerapkan QRIS terlebih mengikuti alur pendaftaran terlebih dahulu untuk mendaftarkan usahanya ke Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia. Hasil observasi dari peneliti bahwa PJSP yang telah ditunjuk di Kota Banda Aceh antara lain:

- a. Bank Aceh Syariah;
- b. Bank Syariah Indonesia, atau;
- c. Mengakses situs web PJP QRIS seperti www.qris.online atau www.qris.id, dan melakukan pengisian formulir pendaftaran pada halaman registrasi QRIS (Online).

Setelah mendaftarkan diri, pelaku usaha atau UMKM akan mendapatkan akun QRIS yang terdiri dari kode QR dan URL. Kode QR dapat dicetak dan dipasang di tempat usaha UMKM, sedangkan URL dapat digunakan untuk menerima pembayaran melalui aplikasi pembayaran digital.

2. Konfigurasi Aplikasi Pembayaran Digital

UMKM harus mengkonfigurasi aplikasi pembayaran digitalnya dengan menunggu proses verifikasi agar dapat menerima pembayaran QRIS. Konfigurasi ini biasanya dilakukan dengan memasukkan kode QR dan URL yang telah didapatkan dari PJSP. Setelah terdaftar, UMKM akan mendapatkan QR Code QRIS. QR Code ini dapat dicetak dan ditempel di tempat usahanya. UMKM perlu memasang aplikasi pembayaran digital yang mendukung QRIS. Aplikasi pembayaran digital ini dapat diunduh secara gratis dari *Google Play Store* atau *App Store*. Adapun aplikasi pembayaran digital yang dapat digunakan untuk menerima pembayaran QRIS antara lain:

- 1) QRIS Online
- 2) GoPay
- 3) OVO
- 4) DANA
- 5) ShopeePay
- 6) LinkAja
- 7) Mobile Banking BSI
- 8) Mobile Banking Aceh

3. Pemanfaatan Aplikasi QRIS

Setelah semua proses di atas selesai, UMKM dapat mulai memanfaatkan QRIS untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Setelah memiliki aplikasi pembayaran digital, Aplikasi QRIS dapat digunakan oleh siapa saja, baik konsumen maupun *Merchant*. Berdasarkan hasil pengamatan observasi, peneliti memperoleh informasi cara menggunakan aplikasi QRIS dapat dibagi menjadi dua sudut pandang, yaitu:

a. Cara Menggunakan Aplikasi sebagai pelanggan

Adapun tata acara atau langkah-langkah berikut untuk melakukan pembayaran menggunakan QRIS:

1. Buka aplikasi pembayaran digital. Dapat berupa aplikasi dompet digital atau *E-Wallet* atau aplikasi mobile banking.
2. Pilih opsi Bayar dan Scan QR.
3. Mengarahkan Kamera pada Handphone ke kode QRIS yang ditempel oleh *Merchant*.
4. Masukkan nominal pembayaran.
5. Masukkan PIN atau biometrik/sidik jari untuk menyelesaikan transaksi.

b. Cara Menggunakan Aplikasi QRIS sebagai *Merchant*

Untuk menggunakan aplikasi QRIS sebagai *Merchant*, perlu mendaftarkan diri sebagai *Merchant* QRIS terlebih dahulu. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui situs web Bank Indonesia atau melalui penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJS) yang bekerja sama dengan BI. Setelah terdaftar, akan mendapatkan QR Code QRIS. QR Code ini dapat dicetak dan ditempel di tempat usaha. Untuk menerima pembayaran menggunakan QRIS, dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Menunjukkan kode QR QRIS yang dimiliki oleh *Merchant* kepada konsumen.
2. pelanggan memindai kode menggunakan aplikasi pembayaran digital.

3. Pelanggan memasukkan nominal pembayaran.
4. Pelanggan mengisi kode PIN atau biometrik/sidik jari pelanggan
5. Pemberitahuan atau notifikasi dana telah diterima dari HP atau Tablet *Merchant*.

Saat ini, penerapan aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* pada UMKM di Kota Banda Aceh memiliki dampak positif. Para pelaku usaha menyatakan bahwa QRIS secara signifikan mempermudah transaksi pembayaran mereka hanya dengan mengakses dengan perangkat teknologi sementara prosesnya yang sederhana dan terjangkau menjadikannya sebagai langkah efektif dalam mengadopsi transaksi non tunai sehari-hari. Dalam pandangan pihak Bank Indonesia provinsi Aceh, Aplikasi QRIS saat ini menjadi salah satu bentuk transaksi non tunai yang paling populer dan dianggap praktis serta efisien. penggunaannya dinilai mendukung tujuan Bank Indonesia untuk mengarahkan masyarakat menuju masyarakat tanpa uang tunai di Indonesia khususnya pada masyarakat Banda Aceh.

4. Manfaat QRIS

QRIS memungkinkan semua aplikasi pembayaran untuk melakukan transaksi di seluruh *Merchant* tanpa batasan penyelenggara layanan. Penerapan aplikasi QRIS bagi UMKM memiliki berbagai manfaat (Hasil Wawancara dengan Pak Irwan, 2023), antara lain:

- a. Meningkatkan efisiensi operasional. Dengan menggunakan QRIS, UMKM tidak perlu menyediakan berbagai macam aplikasi pembayaran digital untuk melayani pelanggan. Cukup dengan satu aplikasi QRIS, UMKM dapat menerima pembayaran dari berbagai macam metode pembayaran digital.
- b. Meningkatkan keamanan. Transaksi pembayaran dengan QRIS menggunakan teknologi enkripsi yang menjamin keamanan data transaksi.
- c. Meningkatkan daya saing. UMKM yang menerapkan QRIS akan lebih kompetitif dibandingkan UMKM yang belum menerapkan QRIS. Hal ini karena pelanggan lebih menyukai untuk bertransaksi dengan *Merchant* yang menyediakan metode pembayaran digital.
- d. Beberapa aplikasi QRIS dapat diintegrasikan dengan program promosi dan loyalitas. UMKM dapat menawarkan diskon khusus atau *reward* kepada konsumen yang menggunakan aplikasi QRIS untuk pembayaran, mendorong penggunaan yang lebih luas dan membangun loyalitas pelanggan.

- e. Aplikasi QRIS bisa menyimpan riwayat transaksi yang memudahkan UMKM untuk melacak dan merekam setiap transaksi yang terjadi. Hal ini dapat membantu dalam pemantauan keuangan harian dan menyusun laporan keuangan secara lebih sistematis.

4.3 Tantangan Dalam Penerapan Aplikasi QRIS bagi UMKM di Kota Banda Aceh

BI telah memperkenalkan standar QRIS untuk transaksi uang elektronik melalui aplikasi berbasis server, dompet elektronik (*E-Wallet*), atau *mobile banking*. Meskipun mendapat sambutan positif dan diharapkan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, namun penerapannya masih dihadapkan pada beberapa kendala misalnya perubahan budaya atau masalah teknis perangkat. Ini menjadi tantangan tersendiri sehingga penerapan QRIS oleh UMKM kota Banda Aceh tidak terlalu maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian ke beberapa UMKM di kota Banda Aceh, beberapa pengguna atau *Merchant* mengalami berbagai masalah atau kendala, sehingga dapat dikatakan adanya problematika dalam penerapan aplikasi QRIS di kota Banda Aceh. Dari deskripsi tersebut dapat diidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi oleh UMKM di Kota Banda Aceh dalam mengadopsi sistem pembayaran digital QRIS di sertai dari hasil wawancara dengan pihak pakar ekonomi Syariah, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Bank Indonesia Provinsi Aceh. Oleh karena itu peneliti mengelompokkan hasil analisis tantangan-tantangan tersebut dapat menjadi lima bagian, yaitu:

1. Biaya Admin

Dalam konteks penerapan QRIS di UMKM Kota Banda Aceh, salah satu kendala yang muncul adalah biaya administrasi atau biaya admin yang dikenakan oleh Bank Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh (Rachman, 2023), Bank Indonesia telah menetapkan biaya administrasi sebesar 0,3% sebagai Merchant Discount Rate (MDR) bagi pedagang yang menggunakan QRIS, mulai berlaku pada bulan Juli 2023. MDR ini diimplementasikan untuk menjaga keberlanjutan layanan transaksi pembayaran kepada masyarakat, terutama untuk menutupi biaya yang timbul.

Namun, hasil wawancara dengan beberapa UMKM, seperti Warung kopi SMEA Premium Kupu dan Kios Abang Adek Cell, menunjukkan ketidakpuasan terhadap pengenaan biaya admin ini. Pelaku usaha UMKM, terutama yang berskala mikro dan kecil, menyatakan bahwa biaya admin QRIS dapat mengurangi margin keuntungan mereka. Terlebih lagi, UMKM seringkali terbatas dalam kemampuan

mengelola manajemen bisnisnya, sehingga pengenaan biaya admin QRIS menjadi suatu beban tambahan yang mungkin mendorong mereka untuk beralih kembali kepada pembayaran langsung tunai. Oleh karena itu, biaya administrasi QRIS menjadi faktor penting dalam mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam mengadopsi teknologi pembayaran digital ini di Kota Banda Aceh.

2. Konektivitas Jaringan Internet

Dalam kerangka implementasi QRIS di sektor UMKM di Kota Banda Aceh, kendala teknis yang melibatkan ketidakstabilan konektivitas jaringan internet menjadi hambatan signifikan, terutama terkait dengan Warung Kopi Better Life, Warung Kopi Lapan Limong, dan Kios Tanggul Kupi.

Pernyataan dari Pak Saiful Bahri, SE, MM (2023), dalam konteks wawancara, menyoroti bahwa isu ini merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM di kota tersebut ketika mengadopsi QRIS. Usaha mikro dan kecil, seperti Warung Kopi Better Life, menghadapi kesulitan teknis terkait dengan putusnya sinyal yang memperlambat proses transaksi. Hal serupa dialami oleh Warung Kopi Lapan Limong yang mengalami kendala teknis, seperti masalah koneksi internet. Kios Tanggul Kupi juga mendapati kendala teknis saat beberapa pelanggan menggunakan perangkat mereka untuk melakukan pembayaran melalui QRIS, terutama terkait pemindaian kode QR.

Ketersediaan terbatas dan gangguan teknis dalam konektivitas jaringan internet menjadi penyebab utama kegagalan transaksi dengan QRIS. Seperti yang diungkapkan oleh pihak Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Pak Saiful Bahri, SE, MM (2023), pada beberapa kasus, transaksi QRIS mengalami kegagalan akibat kapasitas jaringan yang terbatas, yang berujung pada ketidakmasukan dana yang dikirimkan oleh pelanggan ke dalam saldo Pedagang. Dampaknya, pelaku usaha UMKM terpaksa kembali mengandalkan metode transaksi tradisional yang melibatkan pembayaran tunai guna melayani pelanggan.

Dengan demikian, kendala teknis terkait dengan ketidakstabilan konektivitas jaringan internet yang dihadapi oleh pelaku UMKM menjadi elemen kunci dalam mengidentifikasi hambatan operasional dalam implementasi QRIS di Kota Banda Aceh.

3. Masalah Teknis Pada Aplikasi dan Perangkat

Dalam waktu tertentu, beberapa UMKM juga dapat mengalami bug atau kesalahan sistem dari Aplikasi yang berpotensi memengaruhi mengganggu pembayaran. Hal ini tampak pada pengalaman beberapa UMKM, termasuk Kios Asia Cell dan Tanggul Kupi.

Masalah tersebut, seperti yang diuraikan dalam penelitian, berkaitan dengan bug atau kesalahan sistem yang dapat terjadi pada aplikasi pembayaran digital. Kesalahan ini dapat mencakup kendala dalam pemindaian QR Code, perhitungan nominal yang tidak akurat, atau ketidaksesuaian dengan perangkat lain, sebagaimana disampaikan oleh pihak UMKM Warkop Tanggul Kupi melaporkan bahwa beberapa pelanggan mengalami kendala teknis, terutama terkait dengan pemindaian kode QR, yang menciptakan kesulitan dalam proses pembayaran.

Ketidaktepatan dalam aplikasi QRIS dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengalaman pengguna dan potensial menyebabkan hambatan dalam transaksi non-tunai.

4. Masalah waktu Transaksi Antar Bank

UMKM memerlukan penyesuaian dalam manajemen keuangan hariannya. kendala transaksi antar bank, khususnya terkait dengan masalah waktu penyelesaian transaksi, menunjukkan variasi waktu yang dapat memengaruhi keberhasilan transaksi melibatkan beberapa UMKM, termasuk Cafe Better Life, Warung Makan Mie Ceker dan Rumah Makan Minang Baru.

Keberagaman waktu penyelesaian transaksi antar bank menggunakan QRIS melalui layanan mobile banking menjadi permasalahan signifikan yang dihadapi oleh UMKM. Waktu penyelesaian yang bervariasi ini disebabkan oleh proses internal yang berbeda antar bank. Transaksi yang melibatkan bank yang sama umumnya dapat diselesaikan pada hari yang sama, namun transaksi antar bank yang melibatkan bank yang berbeda cenderung memerlukan waktu penyelesaian hingga hari berikutnya.

Dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi pada Cafe Better Life, Warung Makan Mie Ceker dan Rumah Makan Minang Baru, keterlambatan pencairan dana selama proses transfer antar bank dapat menciptakan kendala operasional, terutama jika transaksi bersifat mendesak. Kesulitan ini membutuhkan penyesuaian dalam manajemen keuangan harian UMKM, mengingat variabilitas waktu penyelesaian yang dapat memengaruhi likuiditas dan kelancaran operasional.

5. Tidak ada peningkatan jumlah pelanggan dan keuntungan

Dalam kerangka transformasi Aplikasi QRIS di sektor UMKM, sebagian besar UMKM yang menjadi fokus penelitian, termasuk King Fried Chicken, Warkop Better Life, Warkop Costa, Kios Asia Cell, Dasyafa Food, dan Warkop Tanggul Kupi di Kota Banda Aceh, telah mengadopsi sistem pembayaran digital QRIS. Meskipun diharapkan bahwa perubahan ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan bisnis, realitasnya menunjukkan bahwa hingga saat ini, belum ada peningkatan yang signifikan dalam jumlah pelanggan atau penjualan bagi para pelaku usaha tersebut.

Peralihan ke sistem pembayaran digital QRIS diharapkan dapat memberikan dorongan positif terhadap perkembangan usaha. Namun, sebagaimana diindikasikan oleh hasil penelitian, terutama pada pelaku usaha seperti King Fried Chicken, Warkop Better Life, Warkop Costa, Kios Asia Cell, Dasyafa Food, dan Warkop Tanggul Kupi, belum terlihat adanya perubahan yang mencolok dalam jumlah pelanggan atau peningkatan keuntungan.

Sejalan dengan tujuan dan efektivitas Aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), penggunaan sistem pembayaran non tunai menghadapi beberapa tantangan yang dapat menghambat penggunaannya secara optimal. Salah satu hambatan bagi UMKM di Kota Banda Aceh adalah biaya administrasi QRIS, khususnya dalam bentuk *Merchant discount rate (MDR)* sebesar 0,3%, yang menimbulkan ketidakpuasan oleh sebagian pelaku usaha karena berpotensi mengurangi margin keuntungan mereka.

Kendala lain mencakup terbatasnya konektivitas jaringan internet, menyebabkan kegagalan transaksi QRIS. Bahkan hingga dana yang dikirimkan pelanggan tidak sesuai pada saldo *Merchant*. Masalah teknis pada aplikasi QRIS, seperti bug atau kesalahan sistem, juga dapat menjadi penghambat penggunaannya. Terakhir, kendala waktu transaksi antar bank, terutama variasi waktu penyelesaian yang tidak konsisten, menjadi tantangan serius yang dapat menghambat operasional UMKM, terutama dalam situasi mendesak. Hal ini sejalan seperti yang disampaikan oleh Pak Riza Aulia, S.E.I., M.Sc (2023) bahwa “Sebagai pengguna QRIS, dalam penerapannya dapat mengidentifikasi beberapa kendala operasional, seperti gangguan jaringan, akses pembiayaan yang tidak maksimal, dan pemotongan biaya yang ditanggung oleh UMKM sendiri. Selain itu, terdapat perbedaan waktu tunggu antar bank, misalnya, bank BSI yang langsung mentransfer ke UMKM, sementara bank lain memerlukan waktu beberapa hari.”

Kendala-kendala ini mencerminkan bahwa meskipun QRIS diharapkan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, implementasinya dihadapi oleh sejumlah tantangan yang perlu diatasi, termasuk dalam hal biaya, konektivitas, literasi masyarakat terhadap QRIS, masalah teknis, waktu penyelesaian transaksi antar bank dan masih belum adanya peningkatan jumlah pelanggan dan kenaikan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan atau problematika ini agar tujuan dari penerapan QRIS dapat tercapai secara lebih optimal di berbagai kalangan masyarakat khususnya para pelaku usaha atau *Merchant* di Kota Banda Aceh.

4.4 Solusi Dalam Penerapan Aplikasi QRIS bagi UMKM di Kota Banda Aceh

Dalam mendukung pertumbuhan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di UMKM Kota Banda Aceh serta mengatasi hambatan implementasi Aplikasi QRIS, perlu diterapkan beberapa solusi. Salah satu langkah yang dianggap penting dan akan terus diperkuat adalah melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan menyeluruh tentang QRIS di kalangan masyarakat dan pelaku usaha Sartika (2022). Untuk itu, diperlukan sejumlah solusi dalam menghadapi tantangan penerapan aplikasi QRIS pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil analisis dari wawancara dengan pihak Bank Indonesia Cabang Provinsi Aceh, pakar ekonomi, dan Dinas Koperasi dan UKM Aceh terdapat beberapa solusi yang bisa diterapkan untuk memfasilitasi penggunaan teknologi ini dan berusaha memaksimalkan optimalisasi penggunaan QRIS di UMKM Banda Aceh di antaranya:

1. Pemberian Subsidi

Dalam konteks implementasi QRIS di Kota Banda Aceh, UMKM dihadapkan pada sejumlah tantangan yang memerlukan solusi terstruktur untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan proses transaksi. Salah satu hambatan signifikan yang diungkapkan oleh pelaku UMKM adalah biaya administrasi QRIS yang dinilai tinggi, terutama terkait dengan *Merchant Discount Rate (MDR)* sebesar 0,3%. Pelaku usaha menyampaikan bahwa hal ini memberikan dampak negatif terhadap margin keuntungan mereka.

Pandangan ini konsisten dengan temuan dari wawancara dengan Pak Riza Aulia, S.E.I., M.Sc (2023), yang mencerminkan bahwa hambatan operasional termasuk pemotongan biaya yang ditanggung oleh UMKM menjadi salah satu tantangan utama. Dalam hal ini, solusi yang diusulkan oleh informan sejalan dengan ide pemberian subsidi atau pemotongan biaya administrasi QRIS untuk memberikan

keringanan kepada UMKM. Seperti yang disampaikan Pak Riza Aulia, S.E.I., M.Sc (2023) menyebutkan “UMKM sebaiknya menjalin kerja sama erat dengan lembaga keuangan lokal untuk bernegosiasi tarif transaksi QRIS yang lebih ramah bagi mereka. Pemerintah setempat juga bisa berperan sebagai fasilitator dalam proses ini, perlu mediasi dan dialog antara UMKM dan lembaga keuangan untuk mencapai kesepakatan yang adil.”

Pemerintah Aceh dapat mengambil inspirasi dari kebijakan serupa di negara atau daerah lain yang telah berhasil mengimplementasikan strategi ini dengan sukses. Pemberian subsidi dapat dilakukan dengan cara mengurangi atau menghapuskan *Merchant Discount Rate (MDR)* sebesar 0,3% atau memberikan potongan harga sebagai insentif bagi UMKM yang menggunakan QRIS. Dalam wawancara dengan Pak Saiful Bahri, SE, MM (2023), tidak secara langsung membahas pemberian subsidi, namun juga menyoroti pentingnya dukungan dari pihak perbankan untuk memberdayakan UMKM. Oleh karena itu, subsidi atau pemotongan biaya dapat diimplementasikan melalui kerjasama yang erat antara pemerintah Aceh, sektor perbankan, dan UMKM untuk mencapai dampak yang signifikan.

Melalui langkah ini, diharapkan menjadi solusi beberapa UMKM di kota Banda Aceh seperti Warung kopi SMEA Premium Kupu dan Kios Abang Adek Cell bisa merasakan keringanan biaya administrasi QRIS, memotivasi adopsi lebih lanjut, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Pemberian subsidi dapat menjadi instrumen efektif untuk menjaga keberlanjutan UMKM dalam mengadopsi teknologi pembayaran non-tunai seperti QRIS

2. Peningkatan Infrastruktur Konektivitas Jaringan

Kendala dalam konektivitas jaringan internet menjadi tantangan signifikan bagi UMKM di Kota Banda Aceh dalam mengadopsi QRIS. Faktor ini diakui sebagai hambatan utama dalam proses transaksi yang membutuhkan stabilitas dan kecepatan internet yang memadai. Temuan ini sejalan dengan pandangan dari Pak Saiful Bahri, SE, MM (2023), yang menyoroti aspek konektivitas jaringan sebagai salah satu tantangan utama di Banda Aceh.

Dalam wawancaranya, Pak Riza Aulia, S.E.I., M.Sc (2023) menyampaikan bahwa “Lembaga keuangan seharusnya berupaya meminimalkan kesulitan operasional, jaringan, dan sistem, serta segera memperbaiki masalah untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap QRIS.” Juga menggarisbawahi

pentingnya konektivitas yang baik untuk mendukung operasional UMKM. Kesesuaian ini memberikan dasar bagi rekomendasi untuk melakukan investasi dalam peningkatan infrastruktur jaringan internet. Lembaga keuangan lainnya perlu terlibat aktif dalam upaya ini, berkolaborasi dengan penyedia layanan internet dan perusahaan telekomunikasi untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan internet di wilayah tersebut.

Referensi dari proyek-proyek serupa yang berhasil di wilayah-wilayah lain dapat menjadi panduan berharga dalam merancang langkah-langkah strategis. Langkah ini sesuai dengan saran Pak Azharsyah Ibrahim, SE.Ak, M.S.O.M (2023), yang menekankan pentingnya investasi dalam teknologi untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Peningkatan infrastruktur konektivitas jaringan tidak hanya akan mendukung penggunaan QRIS tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk terlibat dalam ekosistem digital secara lebih luas.

Oleh karena itu, dengan melakukan investasi yang tepat dalam infrastruktur jaringan, melalui solusi ini diharapkan UMKM di Banda Aceh seperti Warung Kopi Better Life, Warung Kopi Lapan Limong dan Kios Tanggul Kupa dapat mengatasi kendala konektivitas dan merasakan manfaat positif dari adopsi QRIS. Langkah ini memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan UMKM di tingkat lokal.

3. Pembaruan kualitas Aplikasi QRIS

Dari perspektif teknis, permasalahan terkait dengan aplikasi QRIS menjadi kendala utama yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam upaya meningkatkan efektivitas penggunaannya. Temuan ini senada dengan solusi yang diusulkan oleh beberapa UMKM yang telah diwawancarai, yang menyatakan bahwa pembaruan dan perbaikan pada aplikasi QRIS sangat diharapkan.

Pentingnya keberlanjutan dan pembaruan aplikasi QRIS juga ditekankan oleh Pak Irwan (2023) yang menggarisbawahi perlunya peningkatan kualitas aplikasi QRIS dan integrasinya dengan perangkat serta sistem lain. Pak Irwan (2023) juga menyampaikan upaya Bank Indonesia dalam mendukung UMKM dengan fasilitasi pembuatan QRIS, yang mencakup pembaruan dan peningkatan kualitas aplikasi. Dalam kerangka ini, solusi yang diusulkan adalah melibatkan pemerintah untuk mendorong kerjasama antara penyelenggara QRIS, pengembang aplikasi, dan lembaga pengawas. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan pembaruan dan

perbaikan aplikasi QRIS dilakukan secara berkala dan sistematis. Langkah ini sejalan dengan pandangan, Pak Azharsyah Ibrahim, SE.Ak, M.S.O.M (2023), yang menyoroti pentingnya investasi dalam teknologi untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Dengan melakukan pembaruan kualitas aplikasi QRIS, diharapkan bisa menjadi solusi bagi beberapa UMKM termasuk Kios Asia Cell dan Tanggul KUPI. tingkat kenyamanan pengguna dapat ditingkatkan, mendorong adopsi yang lebih luas, dan memastikan bahwa UMKM dapat bertransaksi secara efisien dan efektif.

4. Efisiensi Waktu Transaksi Antar Bank

Permasalahan waktu transaksi antar bank menjadi fokus terakhir dalam upaya meningkatkan efektivitas implementasi QRIS di Kota Banda Aceh. Temuan ini diakui oleh informan dari berbagai pihak, termasuk pakar ekonomi, Pak Riza Aulia, S.E.I., M.Sc (2023) yang menyoroti variasi waktu transaksi yang signifikan, terutama ketika melibatkan bank-bank yang berbeda.

Sejalan dengan solusi yang diusulkan oleh beberapa UMKM yang telah diwawancarai, penguatan kolaborasi antara Bank Indonesia dan bank-bank yang terlibat dalam transaksi QRIS menjadi langkah krusial. Hal ini sejalan dengan jawaban dari Pak Saiful Bahri, SE, MM (2023), yang menekankan pentingnya kerjasama dengan pihak swasta atau lainnya yang mendukung implementasi QRIS bagi UMKM.

Peningkatan infrastruktur teknologi perbankan dan standar interkoneksi antar bank menjadi solusi yang mendalam dan menyeluruh. Pemerintah Aceh dapat memainkan peran strategis dalam mendorong kolaborasi yang lebih erat antara Bank Indonesia dan bank-bank terkait. Upaya ini sejalan dengan pandangan Pak Riza Aulia, S.E.I., M.Sc (2023), yang menyampaikan bahwa “untuk mengatasi perbedaan waktu transaksi antar bank, perlu meningkatkan koordinasi di antara mereka. Pemerintah daerah bisa ikut campur tangan untuk memfasilitasi dialog lintas bank, memastikan bahwa proses transaksi distandarisasi dan waktu penyelesaian dikecilkan. Langkah-langkah praktis, seperti penggunaan teknologi yang mendukung interkoneksi antar bank, juga bisa diterapkan.”

Dengan memperkuat kolaborasi dan meningkatkan infrastruktur teknologi perbankan, diharapkan efisiensi waktu transaksi antar bank dapat ditingkatkan secara substansial. Langkah ini akan membawa manfaat besar bagi pelaku usaha, terutama UMKM seperti Cafe Better Life, Warung Makan Mie Ceker dan Rumah Makan

Minang Baru dalam menghadapi situasi mendesak dapat menyesuaikan manajemen keuangannya dengan baik.

5. Program Edukasi keuangan Digital

Literasi keuangan digital di kalangan masyarakat Kota Banda Aceh menjadi aspek krusial yang memerlukan perhatian serius dalam rangka meningkatkan adopsi QRIS. Pemahaman ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Pak Azharsyah Ibrahim, SE.Ak, M.S.O.M (2023), yang menyoroti rendahnya literasi keuangan digital sebagai salah satu hambatan utama di wilayah tersebut.

Pemerintah Aceh, seperti yang diusulkan oleh informan, dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan literasi keuangan digital di masyarakat. Dalam konteks ini, jawaban dari Pak Irwan (2023) yang menyampaikan “Bank Indonesia mendukung UMKM yang sudah terbiasa menggunakan QRIS melalui berbagai kegiatan, termasuk event seperti BI QRIS goes to campus, program ekspo, dan fasilitasi pembuatan QRIS. Bagi UMKM yang belum terjangkau, sosialisasi intensif diadakan untuk memperluas penggunaan QRIS.” Yang menggarisbawahi upaya sosialisasi dan edukasi terhadap UMKM di Banda Aceh, menjadi relevan. Sejalan dengan Pak Riza Aulia, S.E.I., M.Sc (2023), menyampaikan juga bahwa “Perlu diadakannya kegiatan sosialisasi seperti berupa seminar atau lokakarya, bahkan integrasi literasi keuangan digital ke dalam kurikulum pendidikan formal atau pelatihan non-formal. Dengan begitu, UMKM bisa lebih optimal dalam memanfaatkan QRIS.”

Rekomendasi ini juga sejalan dengan pandangan Pak Saiful Bahri, SE, MM (2023), menyampaikan “Perlu memastikan akses dan pemahaman yang memadai terkait QRIS dengan meminta setiap UMKM membawa kode QRIS mereka dalam setiap kegiatan, seperti pameran yang diadakan di berbagai daerah.” Melalui program edukasi keuangan digital, diharapkan masyarakat Kota Banda Aceh dapat lebih memahami manfaat QRIS dan merasa termotivasi untuk beralih ke pembayaran non-tunai. Langkah ini menjadi bagian integral dalam menciptakan lingkungan yang mendukung transformasi digital ekonomi di tingkat lokal. Solusi ini diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan digital di masyarakat Kota Banda Aceh khususnya bagi UMKM-UMKM sehingga pengetahuannya akan meningkat dan memberikan landasan yang kokoh untuk pertumbuhan adopsi QRIS oleh UMKM, serta mengatasi kendala yang teridentifikasi.

Pembahasan mengenai pemajuan pembayaran non-tunai di Kota Banda Aceh mencakup beberapa aspek kunci, pemberian subsidi bagi UMKM yang telah mendaftar sebagai *Merchant* di aplikasi QRIS. Tantangan konektivitas jaringan internet perlu diatasi dengan investasi infrastruktur yang melibatkan pemerintah dan perusahaan telekomunikasi. Literasi keuangan digital juga menjadi fokus, dengan strategi insentif untuk merubah persepsi masyarakat. Dari sisi teknis, perlu pembaruan berkala pada aplikasi QRIS dan kerjasama antar pihak terkait. Kolaborasi antara Bank Indonesia dan bank-bank terlibat perlu diperkuat untuk meningkatkan efisiensi waktu transaksi antar bank, dengan peningkatan infrastruktur teknologi perbankan.

Melalui pemahaman mendalam terhadap tantangan atau problematika ini dan penerapan solusi-solusi yang terencana dengan baik, diharapkan UMKM di Kota Banda Aceh dapat merasakan manfaat maksimal dari penerapan QRIS dan teknologi pembayaran digital secara keseluruhan. Dengan dukungan pemerintah Aceh dan kolaborasi lintas sektor, potensi pertumbuhan UMKM melalui QRIS dapat dioptimalkan, memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal dan kesejahteraan pelaku usaha UMKM di Kota Banda Aceh.



BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Problematika Penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Aceh (Studi Kasus UMKM di Kota Banda Aceh), maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Mekanisme Aplikasi QRIS di Banda Aceh telah membuka jalan bagi transformasi digital dalam sistem pembayaran. Meluncurkan QRIS sebagai standar nasional, Bank Indonesia bertujuan meningkatkan efisiensi transaksi, inklusi keuangan, dan mendukung pertumbuhan UMKM. Adapun tahapan mekanisme penggunaan QRIS di Banda Aceh, seperti melakukan pendaftaran melalui penyelenggara jasa sistem pembayaran, konfigurasi aplikasi pembayaran digital dan pemanfaatan QRIS.
2. Beberapa tantangan dalam penerapan QRIS pada UMKM Kota Banda Aceh antaranya mencakup pada biaya administrasi yang menyulitkan UMKM, terutama yang berskala mikro, dalam mempertahankan margin keuntungan. Konektivitas jaringan internet yang terbatas menjadi kendala teknis signifikan, menciptakan hambatan dalam proses transaksi dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi pelanggan dan pedagang. Masalah teknis pada aplikasi QRIS, seperti bug atau kesalahan sistem, memberikan risiko terhadap kelancaran transaksi non-tunai. Variabilitas waktu penyelesaian transaksi antar bank menciptakan tantangan operasional yang memengaruhi likuiditas UMKM, khususnya dalam situasi mendesak dan belum terlihat peningkatan yang signifikan dalam jumlah pelanggan atau keuntungan bagi pelaku usaha yang beralih ke QRIS.
3. Untuk mengatasi tantangan penerapan QRIS bagi UMKM di Kota Banda Aceh, beberapa solusi dapat diterapkan. Pertama, subsidi biaya administrasi QRIS bisa diberikan dengan kerjasama pemerintah, sektor perbankan, dan UMKM. Kedua, investasi pada infrastruktur konektivitas internet perlu dilakukan untuk meningkatkan stabilitas transaksi QRIS dengan kolaborasi penyelenggara QRIS, penyedia layanan internet, dan perusahaan telekomunikasi. Ketiga, pembaruan berkala pada kualitas aplikasi QRIS harus terjadi melalui kerjasama pemerintah, penyelenggara QRIS, dan lembaga pengawas. Keempat, peningkatan efisiensi waktu transaksi antar bank dapat dilakukan melalui investasi infrastruktur teknologi perbankan dan standar

interkoneksi antar bank, dengan kerjasama Bank Indonesia dan bank-bank terkait. Kelima, program edukasi keuangan digital perlu dijalankan oleh pemerintah Aceh melalui sosialisasi, seminar, dan integrasi literasi keuangan digital.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti ingin mempertimbangkan untuk memberikan beberapa saran sebagai masukan untuk beberapa pihak yang terkait. Adapun saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Bagi UMKM perlu meningkatkan literasi keuangan digital dan memperkuat integrasi QRIS dalam operasional bisnis mereka. Peningkatan pemahaman tentang manfaat QRIS, cara penggunaan, dan penanganan kendala teknis dapat meningkatkan efisiensi transaksi non-tunai.
2. Bagi Bank Indonesia perlu mempertimbangkan kebijakan subsidi atau pemotongan biaya administrasi QRIS, terutama terkait dengan *Merchant Discount Rate (MDR)* sebesar 0,3%, untuk meringankan beban UMKM. Selain itu, Bank Indonesia dapat mengintensifkan kerjasama dengan bank lainnya untuk meningkatkan efisiensi waktu transaksi antar bank.
3. Bagi Pemerintah Aceh dapat menjadi peran kunci dalam mengedukasi masyarakat dan UMKM tentang manfaat QRIS. Melalui kegiatan sosialisasi, seminar, dan kampanye pemasaran, pemerintah dapat merubah persepsi masyarakat terhadap pembayaran non-tunai. Pertimbangan insentif, seperti diskon pajak, juga dapat digunakan untuk mendorong adopsi QRIS.
4. Bagi Masyarakat perlu diberikan pemahaman lebih mendalam mengenai keuntungan menggunakan QRIS. Penerimaan teknologi ini akan meningkat jika masyarakat memahami manfaat keamanan, efisiensi, dan kenyamanan dalam transaksi non-tunai. Inisiatif literasi keuangan juga perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat dengan percaya diri menggunakan QRIS.
5. Bagi Peneliti selanjutnya dapat mengkaji pada evaluasi dampak terhadap keberlanjutan integrasi QRIS di UMKM, perubahan pola transaksi masyarakat, dan efektivitas kebijakan dari pemerintah dan Bank Indonesia. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat

DAFTAR PUSTAKA

- Acehprov. (2019). *Sektor Pertanian Paling Banyak Serap Tenaga Kerja*. Diambil dari <https://humas.acehprov.go.id/sektor-pertanian-paling-banyak-serap-tenaga-kerja>. Diakses Pada 26 November, 2023
- Adawiyah, W. R. (2013). Faktor Penghambat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): Studi di Kabupaten Banyumas. *Journal & Proceeding FEB UNSOED*, 1 (1), 1-18
- Amanda, F. A., & Tambunan, K. (2022). Analisis Strategi BSI Kcp Stabat Proklamasi dalam Meningkatkan Minat Nasabah Menggunakan Pembayaran Berbasis QRIS. *Regress: Journal of Economics & Management*, 2(1), 91–98.
- Anoraga, P. (2010). *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*. Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana.
- AntaraneWS. (2022). *UMKM Banda Aceh Tumbuh Hingga 92 Persen*. Diambil dari <https://aceh.antaraneWS.com/berita/276669/umkm-Banda-aceh-tumbuh-hingga-92-persen>. Diakses pada 26 November, 2023
- Azzahroo, R. A., & Estiningrum, S. D. (2021). Preferensi Mahasiswa dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai Teknologi Pembayaran. *Jurnal Manajemen Motivasi*, 17(1), 10–17.
- Bandaacehkota. (2021). *Atas Dukungan Pemko, UMKM di Banda Aceh Bertambah Mencapai 16.332*. Diambil dari: <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2021/07/17/atas-dukungan-pemko-umkm-di-banda-aceh-bertambah-mencapai-16-332/>. Diakses pada 26 November, 2023
- Bandaacehkota. (2021). *QRIS Akan Mudahkan Transaksi Pembayaran di Pasar Al Mahirah*. Diambil dari <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2021/12/13/qr-is-akan-mudahan-transaksi-pembayaran-di-pasar-al-mahirah/>. Diakses pada 26 November, 2023
- Bandaacehkota. (2023). *Sekilas - Sejarah Bandar Aceh Darussalam*. Diambil dari <https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html>. Diakses pada 26 November, 2023
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Destiya, J. (2019). Peluang Dan Tantangan Financial Technology (FinTech) Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Dewi, I. K., Mardiana, S., & Karolina. (2023). Financial Technology (FinTech) sebagai Faktor Pendorong Peningkatan UMKM di Ciseeng-Bogor. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 38–43.
- Disemadi, H. S., Silviani, N. Z., Jaya, D., Haiti, R., Geas, L. K. B., Tobing, J. J., & Kasturi, M. I. (2022). Literasi Masyarakat Pesisir terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Financial Technology. *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 68–76.

- Dispar. (2021). *Charming Banda Aceh sebagai Smart Branding Pariwisata*. Diambil Dari <https://dispar.bandaacehkota.go.id/2021/10/08/charming-banda-aceh-sebagai-smart-branding-pariwisata/>. Diakses Pada 26 November, 2023.
- Dwijayanti, A., Anhalsali, S., Rahayu, E. D., Munawar, Z., Komalasari, R., Pramesti, P., & Juliawati, P. (2022). Manfaat Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Nasabah di Bank Jabar Banten (BJB). *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)*, 8(2), 256-264.
- Febrinda, R. R., & Ningsih, R. (2023). Kesiapan Digitalisasi Sistem Pembayaran Non Tunai Di Pasar Rakyat. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 13(2), 87–100.
- Ginantra, N. L. W. S. R., Simarmata, J., Purba, R. A., Tojiri, M. Y., Duwila, A. A., Siregar, M. N. H., ... Siswanti, I. (2020). *Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. Medan: Yayasan kita menulis.
- Gramedia. (2021). *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. Diambil dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-FinTech/> Diakses Pada 3 Maret, 2023
- Habibi, R., Masruro, D. A., & Khonsa, N. H. (2020). *Aplikasi inventory barang menggunakan QR code*. Bandung: Kreatif Industri Nusantara.
- Harahap, H. A. (2021). Pengaruh Penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Terhadap Kepuasan Nasabah BSI Kc 2 Palangka Raya. *Skripsi*. IAIN Palangka Raya.
- Harnita, C. M. (2023). *Tingkatkan Daya Serap KUR, Diskop UKM Turunkan 25 Pendamping ke Seluruh Aceh*. Diambil Dari <https://acehprov.go.id/berita/kategori/ekonomi/tingkatkan-daya-serap-kur-diskop-ukm-turunkan-25-pendamping-ke-seluruh-aceh>. Diakses Pada 26 November 2023
- Ibrahim, A. (2021). *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Katadata. (2021). *Jumlah Merchant Terdaftar QRIS Capai 12,2 Juta hingga November 2021*. Diambil Dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/25/jumlah-Merchant-terdaftar-qr-is-capai-122-juta-hingga-november-2021>. Diakses Pada 26 November, 2023
- Mahyuni, L. P., & Setiawan, I. W. A. (2021). Bagaimana QRIS menarik minat UMKM? Sebuah model untuk memahani intensi UMKM menggunakan QRIS. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 23(4), 735–747.
- Maisarina, R., Irwansyah, M., & Izziah. (2017). Kajian Pengembangan Kawasan Strategis Sektor Perdagangan Dan Jasa Kota Banda Aceh (Studi Kasus Kecamatan Lueng Bata). *Jurnal Teknik Sipil*, 1(2), 451–460.
- Mamuko, T. Y., Masruchin, & Krisnaningsih, D. (2022). Implementasi Strategi Customer Relationship Management Pada Industri Financial Technology Microfinance Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 5(1), 132–139.
- Mayanti, R. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan User Terhadap Penerapan Quick Response Indonesia Standard Sebagai Teknologi Pembayaran Pada Dompert Digital.

Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, 25(2), 123–135.

- Moleong, L. . (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, R. A. (2021). Analisis Persepsi Pedagang Pada Penggunaan Qris Sebagai Alat Transaksi Umkm Di Kota Medan. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Nurchaya, Y. A., & Dewi, R. P. (2019). Analisis Pengaruh Perkembangan FinTech dan E-Commerce terhadap Perekonomian Masyarakat. *JAB (Jurnal Akuntansi & Bisnis)*, 5(2), 21–35.
- Perkim.id. (2020). *PKP Kota Banda Aceh*. Diambil Dari <https://perkim.id/profil-pkp/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kota-banda-aceh/>. Diakses Pada 26 November, 2023
- Purwanto, H., Yandri, D., & Yoga, M. P. (2022). Perkembangan dan Dampak Financial Technology (FinTech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 11(1), 80–91.
- Putri, M. S. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Notarius*, 1(1), 73–83.
- Qashlim, A., & Hasruddin. (2015). Implementasi Teknologi QR-Code Untuk Kartu Identitas. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Al Asyariah Mandar*, 1(2), 1–6.
- Rachman, A. (2023). *BI Tetapkan Tarif Baru QRIS 0,3%, Ini Alasannya!*. Diambil Dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230704150326-17-451186/bi-tetapkan-tarif-baru-qris-03-ini-alasannya>. Diakses Pada 26 November 2023.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rumondang, A., Sudirman, A., Effendy, F., Simarmata, J., & Agustin, T. (2019). *FinTech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*. Medan: Yayasan kita menulis.
- Saputri, O. B. (2020). Preferensi konsumen dalam menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai alat pembayaran digital. *Jurnal Kinerja*, 17(2), 237–247.
- Saragih, S. P., & Nopriadi. (2019). Pengaruh Budaya Terhadap Actual Use Payment System Pada Pelaku UMKM di Kota Batam. *Jurnal Polibatam*, 3(2). 63-67.
- Sartika, P. S. (2022). Implementasi Aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Aceh (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Daud Beureueh 1). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Sekarsari, K. A. D., Indrawati, C. D. S., & Subarno, A. (2021). Optimalisasi Penerapan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Pada Merchant di Wilayah Surakarta. *JIKAP (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)*, 5(2), 42–57.
- Semarangkota. (2023). *Pengertian FinTech: Jenis, Manfaat, dan Contoh Perusahaan FinTech*.

Di ambil Dari <https://sukorejo.semarangkota.go.id/umkm>. Diakses Pada 26 November, 2023

- Setiawan, I. W. A., & Mahyuni, L. P. (2020). QRIS Di Mata UMKM: Eksplorasi Persepsi Dan Intensi UMKM Menggunakan QRIS. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(9), 921–946.
- Sijabat, Y. P., Hutajulu, D. M., & Sihombing, P. (2019). Determinasi Technology Acceptance Model Terhadap Niat Penggunaan FinTech Sebagai Alat Pembayaran (Payment). *In Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar*, 3(2), 151–166.
- Sumitro, W. (2004). *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syarifudin, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(4), 408–421.
- Tambunan, T. T. . (2009). *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tri W, A. (2023). *Pelaku UMKM Aceh Dilatih Literasi Keuangan*. Diambil dari <https://diskominfo.acehprov.go.id/berita/kategori/kegiatan/pelaku-umkm-aceh-dilatih-literasi-keuangan>. Diakses Pada 26 November, 2023.
- Widayati, Y. T. (2017). Aplikasi Teknologi QR (Quick Response) Code Implementasi Yang Universal. *KOMPUTAKI*, 3(1), 66–82.
- Yuliati, T., & Handayani, T. (2021). Pendampingan Penggunaan Aplikasi Digital QRIS Sebagai Alat Pembayaran Pada UMKM. *Communnity Development Journal*, 2(3), 811–816.

LAMPIRAN

1) Lampiran Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim	: Renail Rozy / 170603175
Tempat/tanggal lahir	: Banda Aceh / 10 Oktober 1999
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Kebangsaan	: Indonesia
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Jalan T. Dilhong I Desa Peunyerat, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh
Orang Tua	
Nama Ayah	: Abdurrahman
Nama Ibu	: Suryana
Alamat	: Jalan T. Dilhong I Desa Peunyerat, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh
Pendidikan	
SD/MI	: Min Lhong Raya Banda Aceh
SMP/MTS	: SMP Negeri 7 Banda Aceh
SMA/MA	: SMA Negeri 1 Banda Aceh
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri AR-Raniry

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Banda Aceh, 18 Desember 2023
Yang Menyatakan

Renail Rozy

2) Lampiran Wawancara

Informan	Pertanyaan
<p>Pihak UMKM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang Anda ketahui tentang QRIS, dan bagaimana pendapat Anda tentang penggunaannya dalam bisnis UMKM? 2. Apakah bisnis Anda telah menerapkan QRIS? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda menggunakan QRIS dalam bisnis Anda? 3. Bagaimana pendapat Anda tentang keamanan QRIS? Apakah Anda khawatir tentang potensi kebocoran data pelanggan Anda? 4. Apa yang Anda pikirkan tentang biaya transaksi yang dikenakan pada penggunaan QRIS? Apakah menurut Anda biaya tersebut terlalu mahal atau wajar? 5. Apa kendala yang Anda alami dalam menerapkan QRIS dalam bisnis Anda? Apakah ada masalah teknis atau kebijakan yang menghambat penggunaannya? 6. Apakah QRIS telah membantu mempercepat proses transaksi dalam bisnis Anda? Apakah ada perbedaan signifikan dalam waktu transaksi sebelum dan setelah menggunakan QRIS? 7. Apakah Anda mengalami peningkatan jumlah pelanggan setelah menerapkan QRIS dalam bisnis Anda? Apakah ada pengaruh dari penggunaan QRIS terhadap jumlah penjualan dan keuntungan bisnis Anda? 8. Apakah Anda memiliki saran atau masukan untuk perbaikan penerapan QRIS di Indonesia, terutama di Banda Aceh? 9. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam membantu mempromosikan penggunaan QRIS bagi UMKM di Aceh?
<p>Pihak Perbankan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme penerapan Aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di wilayah Banda Aceh khususnya dalam konteks UMKM, menurut perspektif Bank Indonesia? 2. Dari pengalaman Bank Indonesia, apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM di Banda Aceh dalam

Informan	Pertanyaan
	<p>mengimplementasikan QRIS?</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Bagaimana Bank Indonesia bekerjasama atau memberikan dukungan kepada UMKM di Banda Aceh dalam mengatasi tantangan yang muncul dalam penerapan QRIS? 4. Apakah Bank Indonesia memiliki program atau inisiatif khusus yang bertujuan untuk memfasilitasi UMKM di Banda Aceh dalam menggunakan QRIS? 5. Dalam pandangan Bank Indonesia, bagaimana QRIS dapat membantu dalam pertumbuhan dan pengembangan UMKM di kota Banda Aceh? 6. Apakah Bank Indonesia memiliki saran atau rekomendasi tertentu untuk meningkatkan efektivitas penerapan QRIS oleh UMKM di wilayah Banda Aceh? 7. Bagaimana Bank Indonesia melihat peran kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan UMKM dalam menjalankan QRIS di Banda Aceh? 8. Menurut pandangan Bank Indonesia Apa hambatan atau perbedaan khusus yang mungkin dihadapi oleh UMKM di Banda Aceh dalam mengadopsi QRIS jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia? 9. Bagaimana Bank Indonesia mengukur keberhasilan atau dampak dari implementasi QRIS terhadap UMKM di Banda Aceh, dan apakah ada data atau statistik yang mendukungnya? 10. Dalam kerangka peraturan dan regulasi yang ada, apakah Bank Indonesia memiliki rencana untuk meningkatkan pemahaman dan edukasi terkait QRIS bagi UMKM di Banda Aceh, dan jika iya, bagaimana rencana tersebut akan diimplementasikan?
<p>Pakar Ekonomi atau Pihak Akademisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme penerapan Aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dapat memberikan manfaat konkret bagi UMKM di kota Banda Aceh menurut Bapak? 2. Menurut pandangan Bapak, apa saja tantangan utama yang

Informan	Pertanyaan
	<p>mungkin dihadapi oleh UMKM di Banda Aceh dalam menerapkan Aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), dan bagaimana cara mengatasinya?</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. apa yang bisa menjadi solusi efektif untuk meningkatkan penerapan Aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di kalangan UMKM di Banda Aceh, terutama dalam konteks ekonomi lokal? 4. Bagaimana kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan UMKM dapat mendukung penerapan QRIS? 5. Apakah ada contoh sukses atau best practices dari daerah lain yang dapat dijadikan acuan dalam mengatasi permasalahan serupa yang dihadapi oleh UMKM di Banda Aceh terkait QRIS? 6. Bagaimana seharusnya pemerintah daerah Banda Aceh dan pemangku kepentingan lainnya berkolaborasi untuk memfasilitasi UMKM dalam menerapkan QRIS dengan lebih baik?
Dinas Koperasi dan UKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme penerapan Aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bagi UMKM yang telah diidentifikasi atau diterapkan di Kota Banda Aceh menurut pihak dinas koperasi dan UKM? 2. Menurut pengalaman pihak dinas koperasi dan UKM, apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM dalam menerapkan Aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Kota Banda Aceh? 3. Bagaimana pihak dinas koperasi dan UKM mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang muncul selama penerapan Aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bagi UMKM di Kota Banda Aceh?

Informan	Pertanyaan
	<p>4. Apakah terdapat langkah-langkah atau solusi konkret yang telah diambil oleh pihak dinas koperasi dan UKM untuk memastikan keberhasilan penerapan QRIS oleh UMKM di wilayah ini?</p> <p>5. Apakah terdapat pelatihan atau dukungan khusus yang diberikan kepada UMKM di Kota Banda Aceh dalam memahami dan mengimplementasikan Aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)?</p> <p>6. Bagaimana pihak dinas koperasi dan UKM memastikan bahwa UMKM di Kota Banda Aceh memiliki akses dan pemahaman yang memadai terkait dengan teknologi QRIS?</p> <p>7. Dalam konteks penerapan QRIS, apakah terdapat kerjasama atau kemitraan antara pihak dinas koperasi dan UKM dengan pihak swasta atau pihak lain yang mendukung implementasi QRIS bagi UMKM?</p>



Wawancara bersama UMKM warkop better life

1. Apa yang Anda ketahui tentang QRIS, dan bagaimana pendapat Anda tentang penggunaannya dalam bisnis UMKM?

Jawaban:

Ya saya tahu tentang aplikasi QRIS ini, apalagi kita menerapkan sistem QRIS di cafe better life. Untuk penggunaannya sendiri, kita butuh kamera Handphone untuk transaksinya.

2. Apakah bisnis Anda telah menerapkan QRIS? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda menggunakan QRIS dalam bisnis Anda?

Jawaban:

Ya saya pakai. Dari segi pengalaman saya aplikasi ini bagus jadi mudah orang melakukan transaksi jual beli

3. Bagaimana pendapat Anda tentang keamanan QRIS? Apakah Anda khawatir tentang potensi kebocoran data pelanggan Anda

Jawaban:

Untuk saat ini kami,keamanannya bagus tidak ada kendala. QRIS aman, Konsumen lebih nyaman untuk transaksi jual beli.

4. Apa yang Anda pikirkan tentang biaya transaksi yang dikenakan pada penggunaan QRIS? Apakah menurut Anda biaya tersebut terlalu mahal atau wajar?

Jawaban:

Pendapat saya mengenai pengenaan biaya saat transaksi kalau menurut saya itu wajar saja itu bagian perputaran dari ekonomi jadi tidak ada masalah

5. Apa kendala yang Anda alami dalam menerapkan QRIS dalam bisnis Anda? Apakah ada masalah teknis atau kebijakan yang menghambat penggunaannya?

Jawaban:

Kendala yang sering saya hadapi adalah terkadang saat melakukan pembayaran, terjadi masalah teknis seperti putusnya sinyal yang menyebabkan proses menjadi agak lambat.

6. Apakah QRIS telah membantu mempercepat proses transaksi dalam bisnis Anda? Apakah ada perbedaan signifikan dalam waktu transaksi sebelum dan setelah menggunakan QRIS?

Jawaban:

Untuk saat ini, percepatan transaksi sangat perlu untuk efisiensi dan kenyamanan. Namun, menurut pandangan saya, jika perbedaan waktu transaksi tidak signifikan. Secara keseluruhan tidak terlalu berpengaruh dan serupa dengan pengalaman bertransaksi secara umum. Meskipun percepatan transaksi diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar, namun jika perbedaan waktu yang terjadi tidak begitu mencolok, pengaruhnya mungkin terasa minimal dalam pengalaman pengguna.

7. Apakah Anda mengalami peningkatan jumlah pelanggan setelah menerapkan QRIS dalam bisnis Anda? Apakah ada pengaruh dari penggunaan QRIS terhadap jumlah penjualan dan keuntungan bisnis Anda?

Jawaban:

Setelah menggunakan QRIS, jumlah pelanggan bisa naik tapi kadang tidak terlalu signifikan. Penggunaan QRIS juga membantu peningkatan penjualan, meskipun hasilnya bervariasi. Tetap, faktor rezeki tetap berpengaruh pada kesuksesan bisnis.

8. Apakah Anda memiliki saran atau masukan untuk perbaikan penerapan QRIS di Indonesia, terutama di Banda Aceh?

Jawaban:

Beberapa saran untuk perbaikan penerapan QRIS di Indonesia, khususnya di Banda Aceh. Pertama, dari segi teknis, perlu ditingkatkan kualitas jaringan untuk mengatasi keterlambatan dan kadang-kadang tidak masuknya dana. Selain itu, perlu pemantauan dan perbaikan rutin untuk memastikan konsistensi dan kehandalan layanan QRIS. Selanjutnya, penyedia layanan QRIS perlu terus berkomunikasi

dengan pengguna untuk mengidentifikasi masalah dan menanggapi umpan balik, sehingga pengalaman pengguna semakin baik seiring waktu.

9. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam membantu mempromosikan penggunaan QRIS bagi UMKM di Aceh

Jawaban:

Untuk saat ini, sepertinya belum ada inisiatif atau saran yang diberikan oleh pemerintah daerah terkait promosi penggunaan QRIS bagi UMKM di Banda Aceh. Saya belum menemukan informasi atau dukungan yang spesifik dari pihak pemerintah terkait hal ini. Mungkin ada kebutuhan untuk lebih memperjelas peran dan dukungan yang bisa diberikan oleh pemerintah daerah untuk mendorong Pemakaian QRIS di kalangan UMKM..

Wawancara Bersama UMKM Rumah Makan Minang Baru

1. Apa yang Anda ketahui tentang QRIS, dan bagaimana pendapat Anda tentang penggunaannya dalam bisnis UMKM?

Jawaban:

QRIS merupakan alat bertransaksi yang dilakukan antar penjual dan pelanggan secara virtual atau non tunai. Fitur Qris ini sangat berguna bagi pelanggan yang lupa membawa uang tunai saat bertransaksi dan juga Qris dapat menghemat waktu pelanggan daripada melakukan penarikan di ATM.

2. Apakah bisnis Anda telah menerapkan QRIS? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda menggunakan QRIS dalam bisnis Anda?

Jawaban:

Sudah, dalam penerapan pembayaran via Qris saya merasa tenang apabila ada pelanggan yang lupa membawa uang tunai, jadi pelanggan tidak harus keluar lagi dari mencari ATM dan pernah ada yang tidak membayar belanjanya

3. Bagaimana pendapat Anda tentang keamanan QRIS? Apakah Anda khawatir tentang potensi kebocoran data pelanggan Anda?

Jawaban:

Sesungguhnya saya khawatir. Namun, saya yakin tim cyber keamanan Bank pasti akan berusaha mengamankan akun para nasabahnya.

4. Apa yang Anda pikirkan tentang biaya transaksi yang dikenakan pada penggunaan QRIS? Apakah menurut Anda biaya tersebut terlalu mahal atau wajar?

Jawaban:

Biaya yang dikenakan saat bertransaksi merupakan hal yang wajar, namun saya berharap juga apabila penggunaan QRIS tanpa dikenakan biaya karena hal ini akan membuat pengusaha umkm tidak merasa keuntungan mereka dikurangi.

5. Apa kendala yang Anda alami dalam menerapkan QRIS dalam bisnis Anda? Apakah ada masalah teknis atau kebijakan yang menghambat penggunaannya?

Jawaban:

Kendala yang saat ini dihadapi yaitu telatnya pemasukan yang diterima dari bank lain selain bank BSI bahkan keterlambatan itu sampai 2 hari kerja dan hal ini sangat disayangkan bagi penggunaan fitur QRIS.

6. Apakah QRIS telah membantu mempercepat proses transaksi dalam bisnis Anda? Apakah ada perbedaan signifikan dalam waktu transaksi sebelum dan setelah menggunakan QRIS?

Jawaban:

Kadang membantu kadang tidak seperti kendala yang saya alami yaitu terlambatnya duit yang terkirim melalui bank selain BSI

7. Apakah Anda mengalami peningkatan jumlah pelanggan setelah menerapkan QRIS dalam bisnis Anda? Apakah ada pengaruh dari penggunaan QRIS terhadap jumlah penjualan dan keuntungan bisnis Anda?

Jawaban:

Sejauh ini tidak

8. Apakah Anda memiliki saran atau masukan untuk perbaikan penerapan QRIS di Indonesia, terutama di Banda Aceh?

Jawaban:

Terutama sekali tolong di perbaiki transaksi yang terlambat masuk dari bank lain. Kedua, kalau bisa ditiadakan pengenaan biaya transaksi melalui fitur Qris.

9. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam membantu mempromosikan penggunaan QRIS bagi UMKM di Aceh?

Jawaban:

Pemerintah dapat melakukan edukasi secara langsung di kantor desa, sekolah dan pemerintah juga dapat melakukan edukasi melalui spanduk, baliho, media sosial dan media lainnya.

Wawancara bersama pihak Bank Indonesia Pak Irwan sebagai asisten ahli bagian pembayaran di BI

1. Apa yang Anda ketahui tentang QRIS, dan bagaimana pendapat Anda tentang penggunaannya dalam bisnis UMKM?

Jawaban:

Dalam mekanismenya menurut perspektif kami, untuk saat ini dapat dikatakan sukses di adopsi di kota Banda Aceh. melibatkan fokus pada penggaetan komunitas UMKM seperti pelaku usaha kopi, makanan, dan minuman. Upaya kami dalam memperkenalkan qris seperti mengadakan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat, yang melibatkan usaha UMKM. dilakukan untuk memahami mereka mengenai QRIS, cara pendaftarannya dapat dilihat dari website QRIS, kelebihan, dampak positifnya serta pemanfaatannya.

2. Dari pengalaman Bank Indonesia, apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM di Banda Aceh dalam mengimplementasikan QRIS?

Jawaban:

Tantangan utama yang dihadapi UMKM di Banda Aceh dalam mengimplementasikan QRIS mencakup aspek infrastruktur dan kecenderungan masyarakat yang masih lebih suka menggunakan uang tunai. Hal ini bisa dari kurangnya literasi ekonomi digital yang selama ini sering ditemukan pada masyarakat khususnya di kota banda aceh. Jadi diperlukan Sosialisasi dan stimulus, seperti diskon atau voucher, diperlukan untuk merangsang minat pembayaran nontunai seperti QRIS dan harapannya mengubah kebiasaan ini.

3. Bagaimana Bank Indonesia bekerjasama atau memberikan dukungan kepada UMKM di Banda Aceh dalam mengatasi tantangan yang muncul dalam penerapan QRIS?

Jawaban:

Bank Indonesia mendukung UMKM yang sudah terbiasa menggunakan QRIS melalui berbagai kegiatan, termasuk event seperti BI QRIS goes to campus, program ekspo, dan fasilitasi pembuatan QRIS. Bagi UMKM yang belum terjangkau, sosialisasi intensif diadakan untuk memperluas penggunaan QRIS.

4. Apakah Bank Indonesia memiliki program atau inisiatif khusus yang bertujuan untuk memfasilitasi UMKM di Banda Aceh dalam menggunakan QRIS?

Jawaban:

BI memiliki program seperti BI QRIS goes to campus dan ekspo yang memfasilitasi UMKM dalam pembuatan QRIS dengan memberikan diskon sebagai insentif. Tujuannya

adalah memberdayakan UMKM dan meningkatkan adopsi QRIS di masyarakat, khususnya di Banda Aceh.

5. Dalam pandangan Bank Indonesia, bagaimana QRIS dapat membantu dalam pertumbuhan dan pengembangan UMKM di kota Banda Aceh?

Jawaban:

QRIS membantu pertumbuhan UMKM di Banda Aceh dengan menjembatani mereka ke ekosistem digital. Melalui pembayaran non tunai, UMKM dapat naik kelas, memperoleh keuntungan ekonomi, dan memudahkan perolehan pembiayaan dari bank

6. Apakah Bank Indonesia memiliki saran atau rekomendasi tertentu untuk meningkatkan efektivitas penerapan QRIS oleh UMKM di wilayah Banda Aceh?

Jawaban:

Bank Indonesia memberikan saran agar UMKM tidak takut menggunakan teknologi digital. Edukasi tentang risiko dan langkah-langkah pencegahan perlu disampaikan untuk membangun kepercayaan dan memotivasi UMKM untuk beralih ke pembayaran non tunai.

7. Bagaimana Bank Indonesia melihat peran kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan UMKM dalam menjalankan QRIS di Banda Aceh?

Jawaban:

Kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, perbankan, dan UMKM sangat penting. Bank Indonesia mendukung berbagai event pemerintah dan memberikan support untuk membina UMKM. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat penggunaan QRIS di Banda Aceh.

8. Menurut pandangan Bank Indonesia Apa hambatan atau perbedaan khusus yang mungkin dihadapi oleh UMKM di Banda Aceh dalam mengadopsi QRIS jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia?

Jawaban:

Perbedaan utama dalam mengadopsi QRIS di Banda Aceh dibandingkan dengan wilayah lain terletak pada budaya penggunaan uang tunai yang masih dominan dan literasi keuangan yang lebih rendah. Sosialisasi dan edukasi intensif menjadi kunci untuk mengatasi perbedaan ini.

9. Bagaimana Bank Indonesia mengukur keberhasilan atau dampak dari implementasi QRIS terhadap UMKM di Banda Aceh, dan apakah ada data atau statistik yang mendukungnya?

Jawaban:

Bank Indonesia mengukur keberhasilan implementasi QRIS dengan data bulanan mengenai jumlah UMKM dan volume transaksi. Target yang ditetapkan memberikan parameter untuk menilai pertumbuhan dan dampak positif dari penggunaan QRIS.

10. Dalam kerangka peraturan dan regulasi yang ada, apakah Bank Indonesia memiliki rencana untuk meningkatkan pemahaman dan edukasi terkait QRIS bagi UMKM di Banda Aceh, dan jika iya, bagaimana rencana tersebut akan diimplementasikan?

Jawaban:

Rencana Bank Indonesia untuk meningkatkan pemahaman dan edukasi terkait QRIS di Banda Aceh melibatkan sosialisasi, acara di berbagai daerah, serta lomba-lomba untuk memberdayakan UMKM. Tujuannya adalah agar masyarakat terbiasa dan semakin memahami manfaat QRIS.

Wawancara bersama pihak Dinas Koperasi dan UKM Aceh. Pak Saiful Bahri, SE, MM Kasi Fasilitasi Usaha Kecil.

Pertanyaan:

1. Bagaimana mekanisme penerapan Aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bagi UMKM yang telah diidentifikasi atau diterapkan di Kota Banda Aceh menurut pihak dinas koperasi dan UKM?

Jawaban:

Saya memang mengharapkan penerapan pembayaran QRIS di UMKM kota Banda Aceh Menurut saya itu akan mempermudah proses pembayarannya dibanding offline atau tunai.

2. Menurut pengalaman pihak dinas koperasi dan UKM, apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM dalam menerapkan Aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Kota Banda Aceh?

Jawaban:

Tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM dalam menerapkan QRIS di Kota Banda Aceh, menurut pengamatan kami, mungkin terkait dengan aspek jaringan yang sangat

sering kami jumpai, namun hasil komunikasi dengan pelaku usaha UMKM menunjukkan tidak ada kendala signifikan

3. Bagaimana pihak dinas koperasi dan UKM mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang muncul selama penerapan Aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bagi UMKM di Kota Banda Aceh?

Jawaban:

Dinas koperasi dan UKM mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang muncul selama penerapan QRIS dengan melakukan sosialisasi rutin bersama perbankan dalam berbagai kegiatan. Kerjasama dengan pihak perbankan juga memberikan peluang bagi UMKM untuk mendaftar dan memperoleh QRIS.

4. Apakah terdapat langkah-langkah atau solusi konkret yang telah diambil oleh pihak dinas koperasi dan UKM untuk memastikan keberhasilan penerapan QRIS oleh UMKM di wilayah ini?

Jawaban:

Upaya konkret dilakukan dengan melibatkan pihak perbankan sebagai mitra dalam sosialisasi, sehingga UMKM dapat memanfaatkan QRIS. Pihak dinas koperasi dan UKM juga mendampingi kur untuk memastikan pelaksanaan QRIS berjalan lancar.

5. Apakah terdapat pelatihan atau dukungan khusus yang diberikan kepada UMKM di Kota Banda Aceh dalam memahami dan mengimplementasikan Aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)?

Jawaban:

Hingga saat ini, belum ada pelatihan khusus untuk UMKM terkait penggunaan QRIS. Namun, diharapkan melalui partisipasi dalam berbagai kegiatan, UMKM dapat secara mandiri menggunakan QRIS

6. Bagaimana pihak dinas koperasi dan UKM memastikan bahwa UMKM di Kota Banda Aceh memiliki akses dan pemahaman yang memadai terkait dengan teknologi QRIS?

Jawaban:

Pihak dinas koperasi dan UKM memastikan akses dan pemahaman yang memadai terkait QRIS dengan meminta setiap UMKM membawa kode QRIS mereka dalam setiap kegiatan, seperti pameran yang diadakan di berbagai daerah.

7. Dalam konteks penerapan QRIS, apakah terdapat kerjasama atau kemitraan antara pihak dinas koperasi dan UKM dengan pihak swasta atau pihak lain yang mendukung implementasi QRIS bagi UMKM?

Jawaban:

Sejauh ini, belum terdapat kerjasama atau kemitraan antara dinas koperasi dan UKM dengan pihak swasta atau lainnya yang mendukung implementasi QRIS bagi UMKM di Kota Banda Aceh.

Wawancara bersama pihak pakar ekonomi. Pak Azharsyah

1. Bagaimana mekanisme penerapan Aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dapat memberikan manfaat konkret bagi UMKM di kota Banda Aceh menurut Bapak?

Jawaban:

Penggunaan QRIS di sini sangat bagus karena sekarang dalam era digital. Ketika UMKM sudah memasang QRIS di kios-kios mereka, transaksi menjadi lebih lancar tanpa terkendala, misalnya uang yang tidak dibawa cukup atau kembalian. Meskipun ada potongan, pemerintah melakukan pemotongan tersebut apabila transaksi melebihi jumlah tertentu.

2. Menurut pandangan Bapak, apa saja tantangan utama yang mungkin dihadapi oleh UMKM di Banda Aceh dalam menerapkan Aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), dan bagaimana cara mengatasinya?

Jawaban:

Tantangannya terletak pada literasi keuangan digital yang masih rendah, karena rata-rata masih mengandalkan pola transaksi konvensional. Ini dipengaruhi oleh pemilik usaha juga. Ketika literasi ini belum merata di kalangan mereka, maka akan timbul masalah di sisi kepercayaan terhadap transaksi digital. Misalnya, jika seseorang tidak terbiasa bertransaksi secara digital, mungkin mereka akan mengalami ketakutan, kecurigaan, atau kekhawatiran apakah uang yang ditransfer masuk atau tidak karena kurangnya pemahaman mereka.

3. Apa yang bisa menjadi solusi efektif untuk meningkatkan penerapan Aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di kalangan UMKM di Banda Aceh, terutama dalam konteks ekonomi lokal?

Jawaban:

Seperti sosialisasi literasi masyarakat terhadap keuangan digital. Tentu, semua pihak, baik perbankan maupun pelaku bisnis, harus mau mengadopsi digitalisasi agar mereka tersentuh oleh perkembangan dunia modern.

4. Bagaimana kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan UMKM dapat mendukung penerapan QRIS?

Jawaban:

Bagus sekali seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sinergi atau kerjasama dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan juga sektor perbankan dapat terjadi. Ini menciptakan sinergitas untuk mencapai tujuan yang sama.

5. Apakah ada contoh sukses atau best practices dari daerah lain yang dapat dijadikan acuan dalam mengatasi permasalahan serupa yang dihadapi oleh UMKM di Banda Aceh terkait QRIS?

Jawaban:

Saya rasa di Jawa banyak hal yang dapat kita tiru. Rata-rata UMKM di Jawa sudah lebih maju dalam adopsi digital dibandingkan dengan kita. Namun, di Banda Aceh, sudah banyak yang mengadopsi hal tersebut. Oleh karena itu, mungkin UMKM di daerah pedalaman bisa diajak ke kota provinsi atau wilayah Jawa untuk melihat bagaimana pola penggunaan QRIS ini bisa memudahkan mereka sehingga mereka tidak terikat dengan uang tunai.

6. Bagaimana seharusnya pemerintah daerah Banda Aceh dan pemangku kepentingan lainnya berkolaborasi untuk memfasilitasi UMKM dalam menerapkan QRIS dengan lebih baik?

Jawaban:

Sesuai dengan porsinya masing-masing, misalnya daerah memiliki kepentingan tertentu. Bisa menyediakan tempat, maksudnya menyediakan inisiator atau pihak perbankan, atau akademisi dapat memberikan materi, sedangkan pelaku usaha dapat menjadi peserta. Dengan demikian, akan tercipta kolaborasi yang baik untuk tujuan meningkatkan penggunaan QRIS ini guna meningkatkan ekonomi daerah.

Wawancara bersama pihak pakar ekonomi syariah Pak Riza Aulia

1. Bagaimana mekanisme penerapan Aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dapat memberikan manfaat konkret bagi UMKM di kota Banda Aceh menurut Bapak?

Jawaban:

Penggunaan QRIS bukan hanya memudahkan UMKM, tetapi juga mempermudah nasabah dalam bertransaksi. Pemilik usaha dapat menerima pembayaran non-tunai

dengan cepat melalui transfer QRIS tanpa harus langsung memasukkan atau mendebitkan uang ke bank, karena kode QRIS tersebut ditransfer langsung ke rekening nasabah atau rekening pemilik usaha.

2. Menurut pandangan Bapak, apa saja tantangan utama yang mungkin dihadapi oleh UMKM di Banda Aceh dalam menerapkan Aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), dan bagaimana cara mengatasinya?

Jawaban:

Sebagai pengguna QRIS dalam usaha, saya mengidentifikasi beberapa kendala operasional, seperti gangguan jaringan, akses pembiayaan yang tidak maksimal, dan pemotongan biaya yang ditanggung oleh UMKM sendiri. Selain itu, terdapat perbedaan waktu tunggu antar bank, misalnya, bank BSI yang langsung mentransfer ke UMKM, sementara bank lain memerlukan waktu beberapa hari.

3. Apa yang bisa menjadi solusi efektif untuk meningkatkan penerapan Aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di kalangan UMKM di Banda Aceh, terutama dalam konteks ekonomi lokal?

Jawaban:

UMKM sebaiknya menjalin kerja sama erat dengan lembaga keuangan lokal untuk bernegosiasi tarif transaksi QRIS yang lebih ramah bagi mereka. Pemerintah setempat juga bisa berperan sebagai fasilitator dalam proses ini, mediasi dan dialog antara UMKM dan lembaga keuangan untuk mencapai kesepakatan yang adil. Lembaga keuangan seharusnya berupaya meminimalkan kesulitan operasional, jaringan, dan sistem, serta segera memperbaiki masalah untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap QRIS. Kemudian, Perlu diadakannya kegiatan sosialisasi seperti berupa seminar atau lokakarya, bahkan integrasi literasi keuangan digital ke dalam kurikulum pendidikan formal atau pelatihan non-formal. Dengan begitu, UMKM bisa lebih optimal dalam memanfaatkan QRIS. Untuk mengatasi perbedaan waktu transaksi antar bank, perlu meningkatkan koordinasi di antara mereka. Pemerintah daerah bisa ikut campur tangan untuk memfasilitasi dialog lintas bank, memastikan bahwa proses transaksi distandarisasi dan waktu penyelesaian dkecilkan. Langkah-langkah praktis, seperti penggunaan teknologi yang mendukung interkoneksi antar bank, juga bisa diterapkan.

4. Bagaimana kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan UMKM dapat mendukung penerapan QRIS?

Jawaban:

Tidak dapat menyamakan penggunaan QRIS di berbagai jenis usaha (mikro, kecil, menengah, besar), pemerintah hanya dapat menghimbau pengusaha untuk menyediakan metode pembayaran QRIS kepada pelanggan agar pembayaran efektif. Lembaga keuangan seharusnya berupaya meminimalkan kesulitan operasional, jaringan, dan sistem, serta segera memperbaiki masalah untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap QRIS.

5. Apakah ada contoh sukses atau best practices dari daerah lain yang dapat dijadikan acuan dalam mengatasi permasalahan serupa yang dihadapi oleh UMKM di Banda Aceh terkait QRIS?

Jawaban:

Saya tidak dapat memberikan gambaran secara spesifik, namun data kredibel dari OJK atau pihak internal perbankan (baik syariah maupun konvensional) dapat memberikan informasi lebih lanjut. Penting untuk memperhatikan keberhasilan QRIS di berbagai daerah.

6. Bagaimana seharusnya pemerintah daerah Banda Aceh dan pemangku kepentingan lainnya berkolaborasi untuk memfasilitasi UMKM dalam menerapkan QRIS dengan lebih baik?

Jawaban:

Supaya manfaat QRIS dapat dirasakan oleh UMKM mikro atau kecil, pemerintah Banda Aceh dapat berkolaborasi dengan lembaga keuangan syariah dan membebaskan biaya administrasi bagi pengusaha kecil atau mikro. Hal ini dapat mengatasi masalah biaya admin dan keterlambatan dana masuk, serta memfasilitasi UMKM dengan membuka rekening secara gratis melalui QRIS.

Lampiran Dokumentasi



Peneliti bersama dengan Pak Irwan (pihak dari Bank Indonesia) untuk melakukan wawancara



Peneliti bersama dengan Pak Saiful Bahri, SE, MM (Pihak Dinas Koperasi dan UMKM) untuk melakukan wawancara



Peneliti bersama dengan Pak Azharsyah (Dosen Febi Uin Ar-Raniry) untuk melakukan wawancara



Peneliti bersama dengan salah satu pelaku UMKM pengguna QRIS (Dasyaka Food)



Peneliti bersama dengan salah satu pelaku UMKM pengguna QRIS (RM. Minang Baru)



Peneliti bersama dengan salah satu pelaku UMKM pengguna QRIS (Warung Kopi Pak Haji)



Peneliti bersama dengan salah satu pelaku UMKM pengguna QRIS (Warung Kopi SMEA Premium)



Peneliti bersama dengan salah satu pelaku UMKM pengguna QRIS (Betterlife Café)



Peneliti bersama dengan salah satu pelaku UMKM pengguna QRIS (Warung Indomie Ceker Judes)



Peneliti bersama dengan salah satu pelaku UMKM pengguna QRIS (Wedana Swalayan)



Peneliti bersama dengan salah satu pelaku UMKM pengguna QRIS (Abang Adek Cell)



Peneliti bersama dengan salah satu pelaku UMKM pengguna QRIS (Asia Cell)



Peneliti bersama dengan salah satu pelaku UMKM pengguna QRIS (King Fried Chicken Setui)



Peneliti bersama dengan salah satu pelaku UMKM pengguna QRIS (Warung Kopi Costa)



Peneliti bersama dengan salah satu pelaku UMKM pengguna QRIS (Lapan Limong Kopi)



Peneliti bersama dengan salah satu pelaku UMKM pengguna QRIS (Tanggul Kopi)



Peneliti bersama dengan salah satu pelaku UMKM pengguna QRIS (Toko Grosir dan Eceran MMR)